

LAKIP

LAPORAN AKUNTABILITAS
INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN 2021



DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

<http://perindag.babelprov.go.id>

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Rahmat dan Karunia-Nya jualah dapat disusun sekaligus diterbitkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021.

Laporan ini disusun mengacu pada Pedoman Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas kinerja merupakan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Laporan dimaksud memuat pencapaian kinerja pelaksanaan program sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017–2022. Diharapkan apa yang telah dicapai oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam kurun waktu tersebut dapat memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Pangkalpinang, 25 Februari 2022

KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



Drs. H. TARMIN, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19681111 199009 1 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Penyusunan Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas dan responsibilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2020. Seiring dengan upaya merealisasikan *good governance*, Dinas Perindustrian dan Perdagangan telah melaksanakan berbagai kegiatan dan program, mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran, serta visi dan misi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung yang secara sistematis telah dituangkan dalam Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017–2022. Visi Gubernur beserta Wakil Gubernur periode 2017-2022 adalah Babel Sejahtera, Provinsi Maju yang Unggul di Bidang Inovasi Agropoltan dan bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi.

Sejalan dengan visi dan misi tersebut diatas serta memperhatikan permasalahan dan tantangan, serta potensi dan peluang yang tersedia, maka tujuan jangka menengah pembangunan Perindustrian dan Perdagangan dirumuskan sebagai berikut:

Tujuan Perindustrian dan Perdagangan:

1. Meningkatnya Nilai Tambah Produksi
2. Meningkatnya Nilai Tambah Penyelenggaraan Perdagangan
3. Mewujudkan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah

Program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 ini merupakan upaya untuk mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran, visi dan misi seperti yang tertuang dalam Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017–2022, serta dalam rangka menjawab isu-isu aktual dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.

Terdapat 3 (tiga) sasaran strategis yang ingin dicapai oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2021 sebagaimana yang tercantum dalam Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2021. Sasaran tersebut adalah:

1. Meningkatnya PDRB Lapangan Usaha Industri Pengolahan
2. Meningkatnya PDRB Lapangan Usaha Perdagangan
3. Meningkatnya Tata Kelola Internal Perangkat Daerah

Capaian kinerja indikator lainnya akan dijelaskan secara terperinci pada BAB III.

Dalam hal akuntabilitas keuangan, tahun 2021 Anggaran Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp 21.720.098.861,00 dengan komposisi Belanja Operasi yang terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp 12.889.545.417,00 Belanja Barang dan Jasa Sebesar Rp 8.442.674.988,00 dan Belanja Modal terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp 387.878.456,00. Pada APBD Perubahan Tahun 2021, anggaran Perindustrian dan Perdagangan menjadi Rp 17.843.864.575,00 (mengalami Refocusing sebesar Rp 3.876.234.286,00 atau 17,85%) dengan komposisi Belanja Operasi yang terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp 13.131.760.562,00 Belanja Barang dan Jasa Sebesar Rp 4.606.157.303,00 dan Belanja Modal terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp 105.946.710,00. Total Realisasi penyerapan anggaran Tahun 2021 sebesar Rp 16.753.291.101,00 atau 93,89%. Sedangkan dana APBN berupa dana Dekonsentrasi dengan total pagu terakhir anggaran Rp 1.811.504.000,00 dan realisasi penyerapan sebesar Rp 1.708.051.171,00 atau 94,29%.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI	iv
B A B I	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Gambaran Umum Organisasi	4
1.4.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi	4
1.4.2 Sumber Daya Manusia dan Asset SKPD	6
1.4.2.1 Sumber Daya Manusia.....	6
1.5 Sistematika Penulisan.....	8
B A B II	9
PERENCANAAN KINERJA.....	9
2.1. PERENCANAAN KINERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN .	9
Tabel 2.1.1 Tujuan Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah.....	12
Tabel 2.1.2 Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah	13
Tabel 2.1.3 Strategi dan Arah Kebijakan.....	16
2.2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021.....	18
Tabel 2.2.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	19
Tabel 2.2.2 Indikator Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Perubahan	20
Tabel 2.2.3 Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	21
2.3. ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA	22
Tabel 2.3.1 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	30
B A B III	31
AKUNTABILITAS KINERJA	31
3.1. CAPAIAN KINERJA.....	31
Tabel 3.1.1 Target kinerja dalam perjanjian kinerja Perangkat Daerah 2021 (eselonII).....	32
Tabel 3.1.2 Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target perjanjian kinerja tahun 2021	32
Tabel 3.1.3 Capaian Kinerja Tahun 2021 Dengan Tahun 2020.....	32

Tabel 3.1.4 Capaian Kinerja Tahun 2021 Dengan Tahun 2020 terhadap Target Renstra 2017-2022	33
3.2. ANALISIS PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MENDUKUNG PENCAPAIAN TARGET KINERJA.....	34
Tabel 3.2.1. Target dan Capaian Program	34
Tabel 3.2.2. Target dan Capaian Kegiatan.....	35
3.3. REALISASI ANGGARAN.....	39
Tabel 3.3.1 Capaian Realisasi Program dan Kegiatan APBD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021	39
Tabel 3.3.2 Capaian Realisasi Program dan Kegiatan APBN Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021	45
BAB IV	46
PENUTUP.....	46
LAMPIRAN	47
Daftar Aset	48
Lampiran Indikator Kinerja Utama	50
Realisasi Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2021 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	51
INDIKATOR KINERJA KUNCI PERDAGANGAN	58
INDIKATOR KINERJA KUNCI PERINDUSTRIAN	63

B A B I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Memperhatikan amanat Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional, Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022, maka dalam upaya mengimplementasikan pelaksanaan Azas Akuntabilitas, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dituntut untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya kepada pimpinan dan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Inpres 7/1999 disebutkan bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan alat untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Tujuan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya. Sedangkan sasaran sistem tersebut adalah: 1) Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya; 2) Terwujudnya transparansi instansi pemerintah; 3) Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional; 4) Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Instansi Pemerintah sebagai unsur Penyelenggara Negara diharapkan dapat mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumberdaya yang didasarkan kepada perencanaan strategis yang telah ditetapkan sebelumnya. Instrumen pertanggungjawaban tersebut berupa Laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing yang menggambarkan keberhasilan dan kegagalan kinerja instansi pemerintah/OPD yang bersangkutan melalui sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada pokoknya adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi

organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja.

Dalam hubungan ini, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai salah satu perangkat Gubernur berkewajiban menyampaikan pertanggungjawaban dalam mengelola berbagai kegiatan pada tahun anggaran 2020 yang mengacu pada program rencana pembangunan jangka menengah daerah yang didanai baik dari APBD maupun dana lainnya. Disamping itu, untuk mengetahui seberapa besar penetapan kinerja dapat dicapai serta kendala-kendala apa yang menghambat pencapaian kinerja perlu dievaluasi sebagai bahan penyempurnaan kebijakan pada tahun mendatang. Sebagai perwujudan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan atas dasar mandat yang telah diberikan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung kepada Kepala Dinas, disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk Tahun 2020.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 dilandasi dengan dasar hukum sebagai berikut :

1. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Laporan dan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja
5. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025;

6. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022;
7. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022;
8. Peraturan Gubernur Nomor 86 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022;
9. Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 86 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017.
10. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
11. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 30 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022.

1.3. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja ini disusun dengan maksud untuk memenuhi ketentuan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP). Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (good governance) di Indonesia pada umumnya dan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung khususnya.

Laporan Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disusun dengan tujuan:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dicapai oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
2. Mendorong Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan;
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk meningkatkan kinerjanya.

1.4. Gambaran Umum Organisasi

1.4.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Perda Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Tugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah melaksanakan kewenangan desentralisasi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang perindustrian dan perdagangan.

Adapun Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah :

- a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian dan bidang perdagangan yang menjadi kewenangan Provinsi;
- b. Penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang perindustrian dan bidang perdagangan yang menjadi kewenangan Provinsi;
- c. Penyelenggaraan administrasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- d. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas Perindustrian dan Perdagangan; dan
- e. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 1 (satu) orang Sekretaris, 4 (empat) orang Kepala Bidang, 2 (dua) orang Kepala UPTD, 5 (lima) orang Kepala Sub Bagian dan 16 (enam belas) orang Kepala Seksi.

Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari:

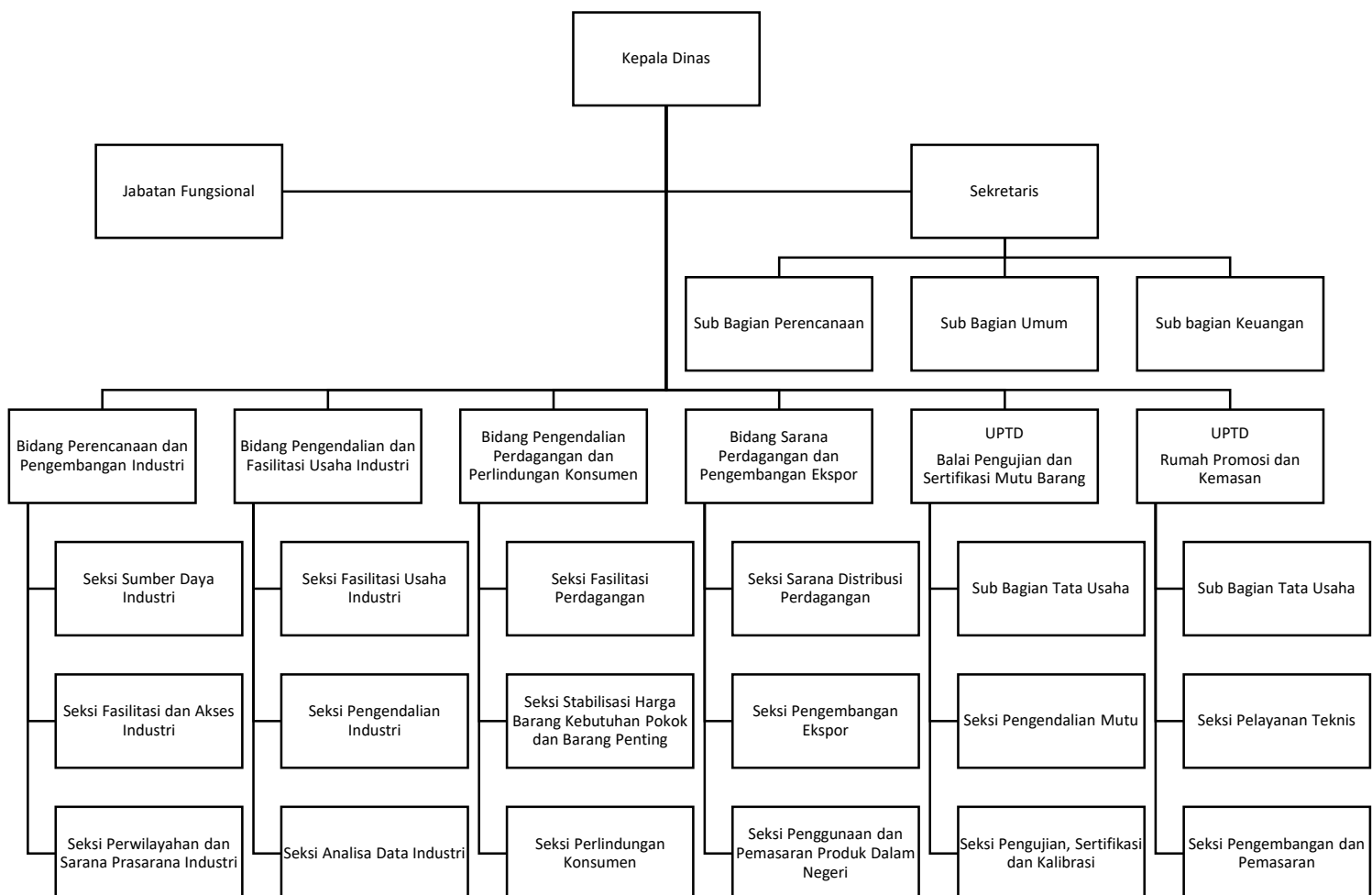
- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat
 - Sub Bagian Perencanaan
 - Sub Bagian Umum
 - Sub bagian Keuangan
- c. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Industri
 - Seksi Sumber Daya Industri
 - Seksi Fasilitasi dan Akses Industri
 - Seksi Perwilayahan dan Sarana Prasarana Industri
- d. Bidang Pengendalian dan Fasilitasi Usaha Industri
 - Seksi Fasilitasi Usaha Industri
 - Seksi Pengendalian Industri
 - Seksi Analisa Data Industri
- e. Bidang Pengendalian Perdagangan dan Perlindungan Konsumen
 - Seksi Fasilitasi Perdagangan
 - Seksi Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
 - Seksi Perlindungan Konsumen
- f. Bidang Sarana Perdagangan dan Pengembangan Ekspor
 - Seksi Sarana Distribusi Perdagangan
 - Seksi Pengembangan Ekspor
 - Seksi Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
- g. Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang
 - Sub Bagian Tata Usaha
 - Seksi Pengendalian Mutu
 - Seksi Pengujian, Sertifikasi dan Kalibrasi
- h. Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Promosi dan Kemasan
 - Sub Bagian Tata Usaha
 - Seksi Pelayanan Teknis
 - Seksi Pengembangan dan Pemasaran

i. Kelompok Jabatan Fungsional Dinas dan UPTD

- Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan;
- Penguji Mutu Barang

Terlampir bagan struktur organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



1.4.2 Sumber Daya Manusia dan Asset SKPD

1.4.2.1 Sumber Daya Manusia

Pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2020 berdasarkan pendistribusian dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 1.1. Tabel 1.1. Jumlah ASN Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Berdasarkan Jabatan dan Jenis Kelamin Per Tanggal 31 Desember 2021

NO	OPD	JUMLAH PEGAWAI	JENIS KELAMIN		JABATAN			KET
			L	P	STRUKTURAL	JFU	JFT	
1	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	74 Orang	45	29	21	41	12	1 TUBEL
2	UPTD BPSMB	18 Orang	8	10	4	8	6	
3	UPTD RPK	10 Orang	6	4	4	6	0	

Sumber: Subbag Umum dan Kepegawaian Dinas Perindag Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021

Tabel 1.2. Jumlah ASN Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Berdasarkan Tingkat Pendidikan Per Tanggal 31 Desember 2021

NO	OPD	PENDIDIKAN									
		S-3	S-2	S-1	D-4	D-3	D-2	D-1	SLTA / Sederajat	SLTP	SD
1	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	0	10	45	2	11	0	0	6	0	0
2	UPTD BPSMB	0	2	8	0	5	0	0	3	0	0
3	UPTD RPK	0	1	6	0	1	0	0	2	0	0

Sumber: Subbag Umum dan Kepegawaian Dinas Perindag Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021

Tabel 1.3. Jumlah ASN Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Berdasarkan Golongan Per Tanggal 31 Desember 2021

NO	OPD	GOLONGAN												
		IV/e	IV/d	IV/c	IV/b	IV/a	III/d	III/c	III/b	III/a	II/d	II/c	II/b	II/a
1	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	0	1	0	4	3	21	15	11	13	5	1	0	0
2	UPTD BPSMB	0	0	0	0	2	1	2	5	4	1	2	0	1
3	UPTD RPK	0	0	0	0	1	0	4	2	0	2	1	0	0

Sumber: Subbag Umum dan Kepegawaian Dinas Perindag Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021

1.4.2.2 Asset SKPD

Asset yang dimiliki oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 dapat dilihat pada lampiran Tabel Rekap Inventaris Barang Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Terlampir bagan tabel Rekap Inventaris Barang Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Pada Bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

II. PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perencanaan kinerja, perjanjian kinerja tahun 2021 dan analisis efisiensi penggunaan sumber daya.

III. AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini di sajikan Capaian Kinerja, Analisa program dan kegiatan yang mendukung capaian sasaran kinerja utama, dan realisasi anggaran program dan kegiatan tahun 2021

IV. PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi sasan indikator utama.

Lampiran

Daftar Aset, Lampiran Indikator Kinerja Utama, Realisasi Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2021 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Indikator Kinerja Kunci Perdagangan dan Indikator Kinerja Kunci Perindustrian

B A B II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. PERENCANAAN KINERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Perencanaan Kinerja dimulai dari agenda penyusunan dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja) dan Dokumen penganggaran atau Rencana Kerja Anggaran (RKA) serta dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (PK)

RENCANA STRATEGIS

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 - 2022 sebagai dokumen perencanaan pembangunan Provinsi untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan, ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah sekaligus tujuan bagi seluruh pelaku pembangunan, yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat serta dunia usaha di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Visi dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017-2022 adalah “Babel Sejahtera, Provinsi Maju, yang Unggul di Bidang Inovasi Agropolitan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi”.

Sehubungan dengan penetapan Visi tersebut, telah ditetapkan rumusan Misi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang merupakan upaya-upaya yang akan dilaksanakan dalam rangka Pencapaian Visi Kepulauan Bangka Belitung selama 5 (lima) tahun yang akan datang sebagai berikut:

1. Meningkatkan pembangunan ekonomi berbasis potensi daerah

Pernyataan misi ini mengandung makna:

- a. *Pembangunan ekonomi* adalah pembangunan bidang ekonomi yang ditandai dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang dilihat dari pertumbuhan ekonomi, melalui peningkatan produksi sektor-sektor ekonomi berbasis inovasi serta peningkatan konsumsi pemerintah dan masyarakat yang diukur dari pendapatan perkapita masyarakat dan pengeluaran pemerintah, peningkatan investasi, serta peningkatan ekspor.
- b. *Berbasis potensi daerah* adalah pembangunan daerah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, yang diprioritaskan kepada peningkatan sektor

pertanian, perikanan, pariwisata dan pertambangan berkelanjutan, serta industri pengolahan dan perdagangan sesuai dengan potensi daerah.

2. Mewujudkan infrastruktur dan konektivitas daerah yang berkualitas

Pernyataan misi ini mengandung makna:

- a. *Infrastruktur* adalah pembangunan infrastruktur untuk mendukung pengembangan potensi daerah serta peningkatan pelayanan publik yang berkualitas.
- b. *Konektivitas daerah* adalah memastikan terhubungnya semua daerah di wilayah provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sehingga mobilisasi penduduk, barang dan jasa semakin cepat, efisien dan berkualitas.

3. Meningkatkan sumber daya manusia unggul dan handal

Pernyataan misi ini mengandung makna:

- a. *Sumber daya manusia* adalah seluruh masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- b. *Unggul dan handal* adalah mempunyai tingkat pendidikan kompetensi dan daya saing yang baik yang diukur dari rata-rata lama sekolah dan kemampuan bersaing ditengah-tengah pembangunan.

4. Meningkatkan kesehatan masyarakat

Pernyataan misi ini mengandung makna:

- a. *Kesehatan Masyarakat* adalah tingkat kesehatan seluruh masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dibangun agar mempunyai derajat kesehatan yang tinggi yang diukur dari Angka Usia Harapan Hidup

5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan demokrasi

Pernyataan misi ini mengandung makna:

- a. *Tata Kelola Pemerintahan yang baik* adalah tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yang terlihat dari birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien serta birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas.
- b. *Pembangunan demokrasi* adalah pembangunan yang menitik beratkan kepada peningkatan kebebasan sipil masyarakat, peningkatan partisipasi politik masyarakat serta lembaga demokrasi.

6. Meningkatkan pengendalian bencana dan kualitas lingkungan hidup

Pernyataan misi ini mengandung makna:

- a. *Pengendalian bencana* adalah kemampuan dan kecepatan mengendalikan bencana mulai dari sebelum terjadi bencana, saat terjadi bencana dan

setelah terjadi bencana untuk untuk meminimalisir korban bencana dan kerusakan akibat bencana.

- b. *Kualitas lingkungan hidup* adalah pembangunan yang dilakukan melalui pendekatan pembangunan yang berkelanjutan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan serta ramah terhadap lingkungan, serta upaya pemulihan lingkungan yang telah rusak.

Berdasarkan dan mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diatas, maka Visi dan Misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentunya harus mendukung keberhasilan Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang tercantum pada RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017 - 2022, terutama yang berhubungan dengan pelaksanaan Misi ke-1 (satu) yaitu : Meningkatkan pembangunan ekonomi berbasis potensi daerah; pembangunan bidang ekonomi yang ditandai dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang dilihat dari pertumbuhan ekonomi, melalui peningkatan produksi sektor-sektor ekonomi berbasis inovasi serta peningkatan konsumsi pemerintah dan masyarakat yang diukur dari pendapatan perkapita masyarakat dan pengeluaran pemerintah, peningkatan investasi, serta peningkatan ekspor. pembangunan daerah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, yang diprioritaskan kepada peningkatan sektor pertanian, perikanan, pariwisata dan pertambangan berkelanjutan , serta industri pengolahan dan perdagangan sesuai dengan potensi daerah, Misi ke-5 (lima) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan demokrasi; tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yang terlihat dari birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien serta birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas, pembangunan yang menitik beratkan kepada peningkatan kebebasan sipil masyarakat, peningkatan partisipasi politik masyarakat serta lembaga demokrasi.

Dalam merealisasikan visi dan misi tersebut Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menetapkan tujuan dan sasaran strategis, dapat dilihat pada tabel 2.1.1 dan tabel 2.1.2

Tabel 2.1.1 Tujuan Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Kinerja Tujuan Tahun ke-				
			1	2	3	4	5
1.	Menumbuhkembangkan industri Bangka Belitung berbasis potensi daerah	Persentase Pertumbuhan Industri (%)	5	5	5	5	5
2.	Pengendalian inflasi dan efisiensi distribusi perdagangan dalam negeri	idealnya stabilitas harga kebutuhan barang pokok 2-3 % (tingkat kenaikan harga)	< 3	< 2.5	< 2.5	< 2.5	< 2.5
3.	Mengembangkan Kinerja Ekspor	Nilai Ekspor Bersih (Juta US\$)	1.162,94	1.186,19	1.203,99	1.222,05	1.240,38
4.	Peningkatan Perlindungan Konsumen	Persentase penurunan Kasus Pengaduan (%)	25	25	50	50	50
5.	Peningkatan PAD	Peningkatan nilai retribusi (%)	80	15	50	50	50
6.	Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran agar terwujud tertib administrasi perkantoran	Persentase Tingkat Pelayanan (%)	100	100	100	100	100
1.	Meningkatkan Pertumbuhan Industri	Persentase Peningkatan Industri (%)		5	5	5	5
2.	Pengendalian Stabilitas Harga	Stabilitas Harga Kebutuhan Barang Pokok dan Penting		<2.5%	<2.5%	<2.5%	<2.5%
3.	Peningkatan Keberdayaan Konsumen dan Kepatuhan Pelaku Usaha	Kenaikan Indeks Keberdayaan Konsumen dan Persentase Ketaatan Pelaku Usaha		37 ; 17,5%	40 ; 28,5%	45 ; 39%	50 ; 50 %
4.	Meningkatnya Penerimaan Retribusi Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	Penerimaan Retribusi Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang		275.000.000	300.000.000	325.000.000	350.000.000

Tabel 2.1.2 Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Tahun ke-				
			1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Industri Sektor Pertanian	Persentase pertumbuhan industri sektor Pertanian (%)	10	10	10	10	10
	Meningkatnya Industri Sektor Kelautan dan Perikanan	Persentase pertumbuhan industri sektor Kelautan dan Perikanan (%)	5	5	5	5	5
	Meningkatnya Industri Sektor Pariwisata	Persentase pertumbuhan industri sektor Pariwisata (%)	2	2	2	2	2
	Meningkatnya Industri Sektor Pertambangan	Persentase pertumbuhan industri sektor Pertambangan (%)	0	0	5	0	5
	Meningkatnya tenaga Kerja Industri	Persentase pertumbuhan tenaga kerja industri (%)	2	2	2	2	2
	Meningkatnya Pembangunan Kawasan Industri	Persentase pertumbuhan kawasan industri (%)	0	20	20	20	40
		persentase pertumbuhan industri kawasan Lepar Pongok (%)					
		persentase pertumbuhan industri kawasan Selat Nasik (%)					
		persentase pertumbuhan industri kawasan Tanjung Ular (%)					
		persentase pertumbuhan industri kawasan Sadai (%)					
persentase pertumbuhan industri kawasan teluk klabat belinyu (%)							

	Meningkatnya Industri pangan yang memproduksi sesuai dengan standar kesehatan industri	Persentase jumlah industri pangan yang memproduksi sesuai dengan standar kesehatan industri.	15	15	15	15	15
2.	Melakukan pengendalian distribusi barang kebutuhan pokok	Ketersediaan barang kebutuhan pokok (persen;komoditi)	100;11	100;11	100;11	100;11	100;11
	Meningkatnya koordinasi pengendalian harga kebutuhan pokok masyarakat	Terkendalinya harga kebutuhan pokok antar waktu (koefisien variasi)	<11	<11	<11	<11	<11
	Meningkatnya ketersediaan sarana perdagangan	Jumlah sarana dan prasarana perdagangan yang dibangun (sarana dan prasarana)	87	92	94	96	98
3.	Meningkatnya produk ekspor, eksportir dan terpantaunya produk impor	Nilai Ekspor (Juta US\$)	1.162,94	1.186,19	1.203,99	1.222,05	1.240,38
4.	Penurunan Jumlah Pengaduan Konsumen	Persentase penurunan jumlah pengaduan (%)	5	5	5	5	5
5.	Meningkatnya jumlah Penerimaan Retribusi pengujian	Peningkatan nilai retribusi Sektor Pertanian (%)	80	10	5	5	5
		Peningkatan nilai retribusi Sektor Pertambangan (%)	0	5	45	45	45
6.	Meningkatnya sarana dan prasarana, sistem pelaporan dan kompetensi sumber daya aparatur	Persentase Tingkat Pelayanan	100	100	100	100	100
1	Menumbuhkembangkan Industri Berbasis Potensi Daerah	Nilai Investasi Industri (Rp)		9.157.209.890	14.157.209.890	16.157.209.890	17.157.209.890
		Persentase Tenaga Kerja Industri		0.82	1.37	1.58	1.68

2	Meningkatnya Ketersediaan Sarana Perdagangan	Persentase Ketersediaan Sarana Perdagangan		1.15	1.15	1.15	1.15
3	Meningkatnya Nilai ekspor	Nilai Ekspor (Juta US\$)		1.668.488.999,16	1.835.337.899,07	2.018.871.688,98	2.220.758.857,88
4	Meningkatnya Pengendalian harga kebutuhan pokok masyarakat	Terkendalinya harga kebutuhan pokok antar waktu (koefisien variasi)		<11	<11	<11	<11
5	Peningkatan Kepatuhan Pelaku Usaha	Persentase Pelaku Usaha yang memiliki legalitas		35%	57%	78%	100%
6	Peningkatan Indeks Keberdayaan Konsumen	Peningkatan Indeks Keberdayaan Konsumen		2	3	5	5
7	Meningkatnya Pengujian dari Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	Persentase Peningkatan Contoh Sampel dari Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang		146	10	10	10
8	Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran agar terwujud tertib administrasi perkantoran	Persentase Tingkat Pelayanan (%)		100	100	100	100
1	Meningkatnya PDRB Lapangan Usaha Industri Pengolahan	Nilai Lapangan Usaha Industri Pengolahan (Triliun Rp)				14,25	14,50
2	Meningkatnya PDRB Lapangan Usaha Perdagangan	Nilai Lapangan Usaha Perdagangan (Triliun Rp)				11,50	11,75
3	Meningkatnya Tata Kelola Internal Perangkat Daerah	Nilai RB Perangkat Daerah				80,00	80,00

Strategi Pencapaian Tujuan dan Sasaran

Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi organisasi untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, meliputi penetapan strategi, kebijakan, program dan kegiatan, dapat dilihat pada tabel II.3

Tabel 2.1.3 Strategi dan Arah Kebijakan

Misi I : Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah		
No.	Strategi	Arah Kebijakan
1.	Menumbuhkembangkan Industri berbasis potensi sumber daya daerah	Mendorong tumbuhnya industri pengolahan berbasis pertanian dan daya saing industri melalui pemanfaatan Teknologi
		Mendorong tumbuhnya industri pengolahan berbasis kelautan dan perikanan
		Mendorong Tumbuhnya industri kreatif, kerajinan dan industri pendukung sektor pariwisata
		Mendorong tumbuhnya industri pengolahan berbasis mineral hasil tambang
		Mendorong penumbuhan, pengembangan dan daya saing industri melalui pendampingan, pelatihan kewirausahaan, pelatihan teknis, manajerial, promosi industri dan memberikan fasilitasi dan akses terhadap industri
2.	Penguatan Struktur Industri Berbasis kawasan strategis, wilayah dan sumber daya lokal yang berkelanjutan	Mendukung penumbuhan dan pengembangan industri yang memberi nilai tambah komoditi utama potensi daerah melalui pendekatan kewilayaan
3.	Mendorong sinergi kebijakan dari sektor-sektor pembangunan lainnya dalam mendukung pembangunan industri daerah dan nasional	Meningkatkan koordinasi kebijakan antara sektor-sektor pembangunan lainnya dalam pembangunan industri daerah dan nasional
4.	Pemetaan Wilayah dan Penetapan Potensi komoditi Unggulan daerah dan penetapan/pembangunan kawasan strategis industri (KI/KPI/SIKIM)	Road map/ Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP)
5.	Mendorong berkembangnya industri pangan yang sehat dan sesuai standarisasi olahan pangan	Memberikan kemudahan fasilitasi dan akses industri dalam mendapatkan informasi nutrisi olahan pangan
6.	Kelancaran Distribusi Barang Pokok dan Barang Strategis	Memperkuat rantai suplay dan pasokan barang terutama bagi bahan kebutuhan pokok dan barang strategis
7.	Penataan usaha perdagangan dan pengembangan usaha baru	Meningkatkan perdagangan antar wilayah/daerah
8.	Meningkatkan pembangunan pasar tradisional dan pasar modern menjadi pasar rakyat	Meningkatkan sistem dan jaringan distribusi barang serta pengembangan pasar dalam negeri

9.	Mempertahankan pasar ekspor yang ada dan mengembangkan pasar baru dengan pelaku dan komoditi ekspor berbasis potensi daerah yang berdaya saing serta upaya mengendalikan impor	Mendorong upaya-upaya perluasan jenis komoditi dan tujuan pasar ekspor yang berkelanjutan ditunjang dengan pemantauan dan pengawasan atas impor daerah
10.	Melaksanakan pembinaan dan pengawasan barang beredar dan jasa serta Tertib Niaga	Peningkatan kesesuaian barang beredar dan Jasa terhadap ketentuan yang berlaku serta pelaku usaha yang memiliki Legalitas
11.	Melaksanakan pembinaan dan pengawasan barang beredar (barang ilegal-bahan berbahaya-standar-dumping, dll	Meningkatkan kapasitas pelayanan publik kepada pelaku usaha
12.	Menjamin mutu pelayanan tera dan tera ulang, kalibrasi alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) Metrologi Legal dan Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT)	mewujudkan lembaga kemetrolgion yang memiliki kompetensi teknis dan manajerial yang memperoleh pengakuan formal (akreditasi) secara nasional maupun internasional
13.	Menambah ruang lingkup pelayanan jasa teknis dan pembinaan standardisasi yang diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) maupun Badan Akreditasi Internasional	Meningkatkan pelayanan pengujian dan sertifikasi mutu
14.	Meningkatkan daya saing produk unggulan daerah melalui pelayanan sertifikasi dan pengendalian mutu	Meningkatkan kapasitas dan kemampuan laboratorium pengujian mutu barang ekspor dan impor
15.	Membina dan melaksanakan koordinasi dengan PPMB, BSN, PUSTAND dan instansi terkait dalam kegiatan standardisasi dan pengendalian mutu	Menjaga kualitas produk ekspor unggulan Bangka Belitung melalui standardisasi dan manajemen mutu barang ekspor pada perusahaan pelaku ekspor
16.	Mendorong berkembangnya industri pangan yang sehat dan sesuai standarisasi olahan pangan	Memberikan kemudahan fasilitasi dan akses industri dalam mendapatkan informasi nutrisi olahan pangan
Misi V : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan demokrasi		
17.	Meningkatkan pelayanan terhadap aparatur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pelayanan administrasi pemerintah 2. Meningkatkan kesiapan dan ketersediaan sarana dan prasarana kantor 3. Meningkatkan kemampuan dan kompetensi sumber daya aparatur 4. Meningkatkan kesadaran kedisiplinan aparatur 5. Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja dengan kesesuaian terhadap dokumen perencanaan daerah.

2.2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Perjanjian kinerja tahunan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disusun mengacu kepada Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan tahun 2017-2022 yang mendasarkan pada program pembangunan daerah sebagaimana tertera dalam RPJMD 2017-2022. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.

Indikator kinerja dalam Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 merupakan alat ukur keberhasilan kinerja dalam mendukung pencapaian visi misi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam melaksanakan program-program selama kurun waktu 2017-2022. Pencapaian indikator kinerja ditunjukkan dengan pencapaian output dan outcome program Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang menjadi indikator pada RPJMD. Rincian selengkapnya mengenai indikator kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD dapat dilihat pada Tabel 2.2.1

Tabel 2.2.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	TUJUAN RPJMD	SASARAN RPJMD	INDIKATOR SASARAN RPJMD	INDIKATOR KINERJA PERINDAG	KONDISI KINERJA PADA AWAL PRIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPJMD	
						2018	2019	2020	2021	2022		
	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya pembangunan berbasis industri	Persentase Pertumbuhan Produksi Sektor Industri Pengolahan		4,47	4,3	4,4	4,5				
					6,22	2,63	2,65	1,25				
				Persentase Pertumbuhan Industri (%)		5	5	5				
				Nilai Investasi Industri (Rp)			9.157.209.890	14.157.209.890				
				Persentase Tenaga Kerja Industri			0,82	1,37				
	Meningkatnya Pengeluaran Pemerintah dan Pendapatan Masyarakat	Menurunnya Angka Inflasi	Persentase Tingkat Inflasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung		6,75	06.42	06.31	06.24				
				Persentase Ketersediaan Sarana Perdagangan			1,15	1,15				
				Nilai Ekspor (US\$)			1.668.488.999,16	1.835.337.899,07				
				Terkendalnya harga kebutuhan pokok antar waktu (koefisien variasi)			<11	<11				
				Persentase Pelaku Usaha yang memiliki legalitas			35%	57%				
				Peningkatan Indeks Keberdayaan Konsumen			2	3				
				Meningkatnya Pendapatan Pemerintah Daerah	Persentase Pertumbuhan Pendapatan Pemerintah Daerah			0,253	0,257			
				Persentase Peningkatan Contoh Sampel dari Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang				146	10			

Tabel 2.2.2 Indikator Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Perubahan

No	TUJUAN RPJMD PERUBAHAN	SASARAN RPJMD PERUBAHAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN RPJMD	INDIKATOR KINERJA PERINDAG	KONDISI KINERJA PADA AWAL PRIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPJMD
						2018	2019	2020	2021	2022	
	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatkan PDRB Sektor Industri Pengolahan Dan Perdagangan	Laju Pertumbuhan Ekonomi						4,50	4,55	4,55
			Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Dan Perdagangan						2,00	4,00	4,00
			Persentase Pertumbuhan Lapangan Usaha Industri Pengolahan						1,00	2,00	2,00
			Persentase Pertumbuhan Perdagangan						1,00	2,00	2,00
			Nilai Lapangan Usaha Industri Pengolahan (Triliyun Rp)						14,25	14,50	14,50
			Nilai Lapangan Usaha Perdagangan (Triliyun Rp)						11,50	11,75	11,75
	Terwujudnya Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi					80	80	80	
			Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai RB Perangkat Daerah					80	80	80

Indikator kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan, terdapat 3 (Tiga) indikator yang ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama. Ke-tiga indikator kinerja utama tersebut adalah sebagaimana tersaji pada Tabel 2.2.3 berikut ini:

Tabel 2.2.3 Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Program	Anggaran/ Perubahan
1.	Meningkatnya PDRB Lapangan Usaha Industri Pengolahan	Nilai Lapangan Usaha Industri Pengolahan	Triliun Rp	14,25	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	829.782.384
					Program Pengendalian Izin Usaha Industri	53.831.972
					Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	0
2.	Meningkatnya PDRB Lapangan Usaha Perdagangan	Persentase Sarana Perdagangan	Triliun Rp	11,5	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	0
					Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	207.102.794
					Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	176.914.348
					Program Pengembangan Ekspor	12.049.754
					Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	270.117.644
					Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	48.742.049
3.	Meningkatnya Tata Kelola Internal Perangkat Daerah	Persentase Pelaku Usaha yang memiliki legalitas	Nilai	80	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	16.245.323.630

2.3. ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Sumber daya yang digunakan dalam menganalisa efisiensi capaian kinerja dibatasi dari anggaran kegiatan saja. Dalam menganalisa efisiensi penggunaan sumber daya digunakan persamaan sebagai berikut:

$$E/I = ((\text{Anggaran Kegiatan} / \text{Target Kinerja}) \times \text{Realisasi Kinerja}) - \text{Realisasi anggaran}$$

Keterangan:

E/I = Efisiensi atau inefisiensi

Kategori efisien atau inefisiensi bukan batasan adanya kerugian Negara atas pemakaian/penggunaan sumber daya keuangan, namun sebagai bahan pertimbangan dalam pemakaian/penggunaan anggaran belanja atas *output* atau *outcome* yang dihasilkan.

I. Nilai Lapangan Usaha Industri Pengolahan

Capaian kinerja dari Nilai Lapangan Usaha Industri Pengolahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2021 didukung oleh anggaran semula Rp 2.193.312.823 dan mengalami refocusing anggaran 59,71% sehingga menjadi Rp 883.614.563 dan realisasi Rp 729.054.256 atau 83,51% yang terdiri dari 3 (tiga) Program yaitu:

1. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri, 2 (dua) kegiatan yaitu:
 - a) Kegiatan Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi, kegiatan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 660.733.563 dan realisasi anggaran sebesar Rp 520.076.368 atau 78,71%. (Kegiatan ini mengalami refocusing 62,54% yang semula dianggarkan Rp 1.763.772.689)
 - b) Kegiatan Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPK), kegiatan dilaksanakan oleh UPTD Rumah Promosi dan Kemasan (RPK) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 169.048.821 dan realisasi anggaran sebesar Rp 162.117.243 atau 95,90%. (Kegiatan ini mengalami refocusing 30,48% yang semula dianggarkan Rp 243.169.708)

2. Program Pengendalian Izin Usaha Industri, 1 (satu) kegiatan yaitu:
 - a) Kegiatan Penerbitan Usaha Industri (IUI), Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi, kegiatan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 53.831.972 dan realisasi anggaran sebesar Rp 46.860.645 atau 87,05%. (Kegiatan ini mengalami refocusing 57,13% yang semula dianggarkan Rp 125.580.117)
3. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional, 1 (satu) kegiatan yaitu:
 - a) Kegiatan Penyediaan Informasi Industri Untuk IUI, IPU, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas), kegiatan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, (Kegiatan ini mengalami refocusing 100,00% yang semula dianggarkan Rp 60.790.309)

Efisiensi penggunaan sumber daya untuk Capaian kinerja dari Nilai Lapangan Usaha Industri Pengolahan adalah sebagai berikut:

$$E/I = ((\text{Anggaran Kegiatan} / \text{Target Kinerja}) \times \text{Realisasi Kinerja}) - \text{Realisasi anggaran}$$

$$E/I = ((\text{Rp } 883.614.356 / 14,250) \times 17,924) - \text{Rp } 729.054.256$$

$$= \text{Rp } 382.377.584$$

Dari hasil perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa Capaian kinerja dari Nilai Lapangan Usaha Industri Pengolahan dapat dikatakan terjadi efisiensi sebesar Rp 382.377.584 atau dengan persentase capaian 125,78%.

II. Nilai Lapangan Usaha Perdagangan

Capaian kinerja dari Nilai Lapangan Usaha Perdagangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2021 didukung oleh anggaran semula Rp 2.526.893.398 dan mengalami refocusing anggaran 71,71% sehingga menjadi Rp 714.926.589 dan realisasi Rp 610.887.215 atau 83,45% yang terdiri dari 6 (enam) Program yaitu:

1. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan, 1 (satu) kegiatan yaitu:
 - a) Kegiatan Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar, kegiatan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan

- Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, (Kegiatan ini mengalami refocusing 100,00% yang semula dianggarkan Rp 55.731.499)
2. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan, 1 (satu) kegiatan yaitu:
 - a) Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi Serta Lelang Komoditas, kegiatan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 207.102.794 dan realisasi anggaran sebesar Rp 197.209.655 atau 95,22%. (Kegiatan ini mengalami refocusing 9,81% yang semula dianggarkan Rp 229.625.963)
 3. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, 3 (tiga) kegiatan yaitu:
 - a) Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi, kegiatan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 18.952.316 dan realisasi anggaran sebesar Rp 14.823.000 atau 78,21%. (Kegiatan ini mengalami refocusing 80,03% yang semula dianggarkan Rp 94.886.814)
 - b) Kegiatan Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten / Kota yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan, kegiatan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 151.944.441 dan realisasi anggaran sebesar Rp 113.106.500 atau 74,44%. (Kegiatan ini mengalami refocusing 27,37% yang semula dianggarkan Rp 209.198.878)
 - c) Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Peptisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya, kegiatan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 6.016.591 dan realisasi anggaran sebesar Rp 3.732.800 atau 62,04%. (Kegiatan ini mengalami refocusing 94,73% yang semula dianggarkan Rp 114.115.463)
 4. Program Pengembangan Ekspor, 1 (satu) kegiatan yaitu:
 - a) Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada Lebih Dari 1(Satu) Daerah Kabupaten/Kota Dalam Provinsi, kegiatan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan

alokasi anggaran sebesar Rp 12.149.754 dan realisasi anggaran sebesar Rp 11.829.754 atau 98,17%. (Kegiatan ini mengalami refocusing 97,52% yang semula dianggarkan Rp 485.767.998)

5. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen, 3 (satu) kegiatan yaitu:
 - a) Kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/ Kota, kegiatan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 31.220.706 dan realisasi anggaran sebesar Rp 28.175.000 atau 90,24%. (Kegiatan ini mengalami refocusing 89,12% yang semula dianggarkan Rp 286.860.610)
 - b) Kegiatan Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah (BPSMB), kegiatan dilaksanakan oleh UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 160.217.891 dan realisasi anggaran sebesar Rp 135.177.065 atau 84,37%. (Kegiatan ini mengalami refocusing 76,91% yang semula dianggarkan Rp 693.758.880)
 - c) Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota, kegiatan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 78.679.047 dan realisasi anggaran sebesar Rp 62.637.400 atau 79,61%. (Kegiatan ini mengalami refocusing 46,65% yang semula dianggarkan Rp 147.481.617)
6. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri, 2 (dua) kegiatan yaitu:
 - a) Kegiatan Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri, kegiatan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, (Kegiatan ini mengalami refocusing 100,00% yang semula dianggarkan Rp 122.948.702)
 - b) Kegiatan Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri (RPK), kegiatan dilaksanakan oleh UPTD Rumah Promosi dan Kemasan (RPK) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 48.742.049 dan realisasi anggaran sebesar Rp 44.196.041 atau 90,67%. (Kegiatan ini mengalami refocusing 43,66% yang semula dianggarkan Rp 86.516.974)

Efisiensi penggunaan sumber daya untuk Capaian kinerja dari Nilai Lapangan Usaha Perdagangan adalah sebagai berikut:

$$E/I = ((\text{Anggaran Kegiatan} / \text{Target Kinerja}) \times \text{Realisasi Kinerja}) - \text{Realisasi anggaran}$$

$$E/I = ((\text{Rp } 714.926.589 / 11,500) \times 12,666) - \text{Rp } 610.887.215$$

$$= \text{Rp } 176.526.713$$

Dari hasil perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa Capaian kinerja dari Nilai Lapangan Usaha Perdagangan dapat dikatakan terjadi efisiensi sebesar Rp 176.526.713 atau dengan persentase capaian 110,14%.

III. Nilai RB Perangkat Daerah

Capaian kinerja dari Nilai RB Perangkat Daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2021 didukung oleh anggaran semula Rp 16.999.892.640 dan mengalami refocusing anggaran 4,44% sehingga menjadi Rp 16.245.323.630 dan realisasi Rp 15.413.349.630 atau 94,88% yang terdiri dari 1 (satu) Program yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, 18 (delapan belas) kegiatan yaitu:
 - a) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, kegiatan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 77.072.956 dan realisasi anggaran sebesar Rp 47.904.630 atau 62,15%. (Kegiatan ini mengalami refocusing 48,96% yang semula dianggarkan Rp 151.017.179)
 - b) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, kegiatan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 13.142.684.012 dan realisasi anggaran sebesar Rp 12.515.168.375 atau 95,23%. (Kegiatan ini mengalami perubahan anggaran yang semula dianggarkan Rp 12.921.800.076)
 - c) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, kegiatan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 191.778.808 dan realisasi anggaran sebesar Rp 152.905.935 atau 79,73%. (Kegiatan ini mengalami refocusing 17,77% yang semula dianggarkan Rp 233.225.765)

- d) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, kegiatan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 15.500.000 dan realisasi anggaran sebesar Rp 15.500.000 atau 100,00%. (Kegiatan ini mengalami refocusing 36,94% yang semula dianggarkan Rp 24.578.800)
- e) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, kegiatan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.987.070.000 dan realisasi anggaran sebesar Rp 1.950.974.326 atau 99,18%. (Kegiatan ini mengalami perubahan yang semula dianggarkan Rp 1.991.842.000)
- f) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, kegiatan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 183.697.798 dan realisasi anggaran sebesar Rp 178.426.041 atau 97,13%. (Kegiatan ini mengalami refocusing 39,67% yang semula dianggarkan Rp 304.481.862)
- g) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (BPSMB), kegiatan dilaksanakan oleh UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 3.459.956 dan realisasi anggaran sebesar Rp 3.418.988 atau 98,82%. (Kegiatan ini mengalami refocusing 29,62% yang semula dianggarkan Rp 4.915.766)
- h) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (BPSMB), kegiatan dilaksanakan oleh UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 27.875.000 dan realisasi anggaran sebesar Rp 23.130.800 atau 82,98%. (Kegiatan ini mengalami refocusing 80,90% yang semula dianggarkan Rp 145.945.246)
- i) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (BPSMB), kegiatan dilaksanakan oleh UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 85.556.578 dan realisasi anggaran sebesar Rp 67.859.286 atau 79,32%. (Kegiatan ini mengalami refocusing 63,71% yang semula dianggarkan Rp 235.746.683)

- j) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (BPSMB), kegiatan dilaksanakan oleh UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 88.163.170 dan realisasi anggaran sebesar Rp 84.667.599 atau 96,04%. (Kegiatan ini mengalami refocusing 48,23% yang semula dianggarkan Rp 170.288.813)
- k) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (BPSMB), kegiatan dilaksanakan oleh UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 102.774.563 dan realisasi anggaran sebesar Rp 70.574.262 atau 68,67%. (Kegiatan ini mengalami refocusing 32,26% yang semula dianggarkan Rp 151.724.563)
- l) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (BPSMB), kegiatan dilaksanakan oleh UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 172.742.309 dan realisasi anggaran sebesar Rp 167.516.654 atau 96,97%. (Kegiatan ini mengalami refocusing 39,83% yang semula dianggarkan Rp 287.070.487)
- m) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (RPK), kegiatan dilaksanakan oleh UPTD Rumah Promosi dan Kemasan (RPK) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 6.067.525 dan realisasi anggaran sebesar Rp 6.051.862 atau 99,74%. (Kegiatan ini mengalami refocusing 26,23% yang semula dianggarkan Rp 8.224.968)
- n) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (RPK), kegiatan dilaksanakan oleh UPTD Rumah Promosi dan Kemasan (RPK) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, (Kegiatan ini mengalami refocusing 100,00% yang semula dianggarkan Rp 31.461.993)
- o) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (RPK), kegiatan dilaksanakan oleh UPTD Rumah Promosi dan Kemasan (RPK) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 54.656.110 dan realisasi anggaran sebesar Rp

46.090.196 atau 84,33%. (Kegiatan ini mengalami refocusing 48,41% yang semula dianggarkan Rp 105.951.794)

- p) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (RPK), kegiatan dilaksanakan oleh UPTD Rumah Promosi dan Kemasan (RPK) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, (Kegiatan ini mengalami refocusing 100,00% yang semula dianggarkan Rp 88.124.663)
- q) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (RPK), kegiatan dilaksanakan oleh UPTD Rumah Promosi dan Kemasan (RPK) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 58.800.000 dan realisasi anggaran sebesar Rp 37.685.186 atau 64,09%. (Kegiatan ini mengalami refocusing 30,29% yang semula dianggarkan Rp 84.349.807)
- r) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (RPK), kegiatan dilaksanakan oleh UPTD Rumah Promosi dan Kemasan (RPK) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 47.424.845 dan realisasi anggaran sebesar Rp 45.475.490 atau 95,89%. (Kegiatan ini mengalami refocusing 19,81% yang semula dianggarkan Rp 59.142.175)

Efisiensi penggunaan sumber daya untuk Capaian kinerja dari Nilai RB Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

$$E/I = ((\text{Anggaran Kegiatan} / \text{Target Kinerja}) \times \text{Realisasi Kinerja}) - \text{Realisasi anggaran}$$

$$E/I = ((\text{Rp } 16.245.323.630 / 80,00) \times 74,81) - \text{Rp } 15.413.349.630$$

$$= \text{Rp } -221.941.370$$

Dari hasil perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa Capaian kinerja dari Nilai RB Perangkat Daerah dapat dikatakan terjadi inefisiensi sebesar Rp 221.941.370 atau dengan persentase capaian 93,51%.

Efisiensi penggunaan sumber daya untuk Capaian kinerja Sasaran Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dari 3 (Tiga) indikator yang ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama. Ke-tiga indikator kinerja utama tersebut adalah sebagaimana tersaji pada Tabel 2.3.1 berikut ini:

Tabel 2.3.1 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
			(Indikator Kinerja yang \geq 100%)		
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya PDRB Lapangan Usaha Industri Pengolahan	Nilai Lapangan Usaha Industri Pengolahan (Triliun Rp)	125,78	82,51	382.377.584
2	Meningkatnya PDRB Lapangan Usaha Perdagangan	Nilai Lapangan Usaha Perdagangan (Triliun Rp)	110,14	85,45	176.526.713
3	Meningkatnya Tata Kelola Internal Perangkat Daerah	Nilai RB Perangkat Daerah	93,51	94,88	(221.941.370)
Rata-Rata			109,81	87,61	112.320.976

B A B III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA

Capaian Kinerja Organisasi dapat dilihat dengan melihat hasil dari Pengukuran dan Penilaian Kinerja. Kerangka Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pengukuran kinerja merupakan hasil penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa : indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

Evaluasi kinerja tahun 2021 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, disusun berdasarkan hasil dari pelaksanaan kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan selama tahun 2021. Pengukuran capaian kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan kesesuaian antara Rencana Kerja Tahunan dengan kegiatan yang telah dilaksanakan. Selain itu juga diukur tingkat capaian kinerja berupa input (masukan), output (keluaran) dan outcome (hasil) dari kegiatan yang telah dilaksanakan berdasarkan tolok ukur kinerja yang telah ditetapkan di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD).

Hingga akhir tahun 2021, Dinas Perindustrian dan Perdagangan telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun seluruh capaian tujuan yang diuraikan dalam capaian sasaran strategis dapat dilihat, sebagai berikut:

PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI

Dalam merealisasikan visi dan misi tersebut Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menetapkan tujuan dan sasaran strategis yaitu:

- a. Target kinerja dalam perjanjian kinerja Perangkat Daerah 2021 (eselon II) adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1.1 Target kinerja dalam perjanjian kinerja Perangkat Daerah 2021 (eselonII)

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target (%)
1.	Meningkatnya PDRB Lapangan Usaha Industri Pengolahan	Nilai Lapangan Usaha Industri Pengolahan (Triliun Rp)	14,25
2.	Meningkatnya PDRB Lapangan Usaha Perdagangan	Nilai Lapangan Usaha Perdagangan (Triliun Rp)	11,50
3.	Meningkatnya Tata Kelola Internal Perangkat Daerah	Nilai RB Perangkat Daerah	80,00

b. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target perjanjian kinerja tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 3.1.2 Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target perjanjian kinerja tahun 2021

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Meningkatnya PDRB Lapangan Usaha Industri Pengolahan	Nilai Lapangan Usaha Industri Pengolahan (Triliun Rp)	14,25	17,924	125,782
2.	Meningkatnya PDRB Lapangan Usaha Perdagangan	Nilai Lapangan Usaha Perdagangan (Triliun Rp)	11,50	12,666	110,139
3.	Meningkatnya Tata Kelola Internal Perangkat Daerah	Nilai RB Perangkat Daerah	80,00	74,81	93,513
Total Rata-rata capaian sasaran					109,811%

c. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2021 Dengan Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1.3 Capaian Kinerja Tahun 2021 Dengan Tahun 2020

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Capaian (%) 2020	Capaian (%) 2021	+/_ (%)
1.	Meningkatnya PDRB Lapangan Usaha Industri Pengolahan	Nilai Lapangan Usaha Industri Pengolahan (Triliun Rp)	14,169	17,924	126,50%
2.	Meningkatnya PDRB Lapangan Usaha Perdagangan	Nilai Lapangan Usaha Perdagangan (Triliun Rp)	11,582	12,666	109,36%
3.	Meningkatnya Tata Kelola Internal Perangkat Daerah	Nilai RB Perangkat Daerah	74,81	74,81	100,00%

d. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan Target dalam Renstra 2017-2022

Tabel 3.1.4 Capaian Kinerja Tahun 2021 Dengan Tahun 2020 terhadap Target Renstra 2017-2022

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target Renstra		Realisasi		Capaian	
			2020	2021	2020	2021	2020	2021
Renstra 2017-2022								
1.	Menumbuhkembangkan Industri Berbasis Potensi Daerah	Nilai Investasi Industri (Milyar Rp)	14,157		186,797		1319,45	
		Persentase Tenaga Kerja Industri	1,37		7,89		575,91	
2.	Meningkatnya Ketersediaan Sarana Perdagangan	Persentase Sarana Perdagangan	1,15		-		0,00	
3.	Meningkatnya Nilai ekspor	Nilai Ekspor (Juta US\$)	1.835,34		1.203,11		65,55	
4.	Meningkatnya Pengendalian harga kebutuhan pokok masyarakat	Terkendalnya harga kebutuhan pokok antar waktu (koefisien variasi)	11,00		9,74		88,55	
5.	Peningkatan Kepatuhan Pelaku Usaha	Persentase Pelaku Usaha yang memiliki legalitas	57,00		40,00		70,18	
6.	Peningkatan Indeks Keberdayaan Konsumen	Peningkatan Indeks Keberdayaan Konsumen	3,00		3,34		111,33	
7.	Meningkatnya Pengujian dari Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	Persentase Peningkatan Contoh Sampel dari Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	10,00		6,17		61,70	
Renstra Perubahan 2017-2022								
1	Meningkatnya PDRB Lapangan Usaha Industri Pengolahan	Nilai Lapangan Usaha Industri Pengolahan (Triliun Rp)		14,25		17,924		125,78
2	Meningkatnya PDRB Lapangan Usaha Perdagangan	Nilai Lapangan Usaha Perdagangan (Triliun Rp)		11,50		12,666		110,14
3	Meningkatnya Tata Kelola Internal Perangkat Daerah	Nilai RB Perangkat Daerah		80,00		74,81		93,51

3.2. ANALISIS PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MENDUKUNG PENCAPAIAN TARGET KINERJA

a. Target dan capaian Program

Tabel 3.2.1. Target dan Capaian Program

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian	Ket
1	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase Pertumbuhan Unit Usaha Industri	1,00%	1,00%	100,00%	
		Persentase Kemasan Produk IKM yang diproduksi (UPTD RPK)	70,00%	100,00%	142,86%	
2	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Prosentase Industri yang sesuai Izin Usaha Industri	30,00%	30,00%	100,00%	
3	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Prosentase data informasi industri di SIINas	70,00%	70,00%	100,00%	
4	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase Tertib Usaha	65,00%	65,00%	100,00%	
5	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Barang terdistribusi	75,00%	75,00%	100,00%	
6	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase Stabilitas dan Jumlah Ketersediaan Harga Barang Kebutuhan Pokok	9,20%	2,25%	175,54%	
7	Program Pengembangan Ekspor	Persentase Pertumbuhan nilai ekspor	2,00%	89,16%	4458,00%	
8	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Nilai Indeks Keberdayaan Konsumen	40,00	42,00	105,00%	
		Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku (UPTD BPSMB)	70,00%	70,00%	100,00%	
9	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Jumlah Produk Lokal yang digunakan dan dipasarkan	12	12	100,00%	
		Persentase Produk IKM yang dipasarkan (UPTD RPK)	70,00%	100,00%	142,86%	
10	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Disperindag)	80,00	74,81	93,51%	
		Survey Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah (Disperindag)	80,00	67,66	84,58%	
		Survey Kepuasan Pelayanan Teknis Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	80,00	67,66	84,58%	
		Survey Kepuasan Pelayanan Teknis Rumah Promosi dan Kemasan	80,00	67,66	84,58%	

b. Target dan capaian kinerja kegiatan

Tabel 3.2.2. Target dan Capaian Kegiatan

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian	Ket
1	Kegiatan Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Nilai Investasi Industri Pengolahan Non-Migas (Rp. Triliun)	4.857,00	4.857,00	100,00%	
		Jumlah Sarana Prasarana Kawasan Industri (Kawasan)	1,00	1,00	100,00%	
		Jumlah Sebaran Wilayah Industri (Kawasan)	1,00	1,00	100,00%	
		Jumlah Tenaga Kerja Industri Pengolahan (Tenaga Kerja)	49.500,00	49.500,00	100,00%	
		Jumlah Sumberdaya Industri yang dibina (Pelaku Industri)	4,00	4,00	100,00%	
		Jumlah Pelaku Industri terbina dengan kategori baik (Pelaku Industri)	24,00	24,00	100,00%	
		Jumlah dokumen perencanaan dan laporan penerapan dan evaluasi RPIP (Dokumen)	2,00	2,00	100,00%	
		Tersusunnya Risalah Naskah Penelitian Pertumbuhan Industri (Naskah)	1,00	1,00	100,00%	
		2	Kegiatan Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPK)	Jumlah Laporan produk yang difasilitasi	6,00	6,00
3	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Povinsi	Jumlah Usaha Industri dalam penerbitan IUI,IPUI, IUKI dan IPKI yg dipantau (Usaha Industri)	20,00	22,00	110,00%	
		Jumlah IUI yang diawasi (Izin Usaha Industri)	1,00	1,00	100,00%	
		Jumlah Usaha Industri yang dibina (Usaha Industri)	1,00	1,00	100,00%	
		Jumlah Usaha Industri yang diawasi (Usaha Industri)	10,00	10,00	100,00%	
		Laporan Pemantauan Usaha Industri (Laporan)	24,00	24,00	100,00%	
		Laporan Analisa Usaha Industri (Laporan)	10,00	10,00	100,00%	
4	Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	Persentase sarana distribusi yang terkelola (%)	35,00	35,00	100,00%	

5	Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	Persentase jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok (%)	70,00	70,00	100,00%	
6	Kegiatan Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Persentase stabilitas harga barang kebutuhan pokok (%)	70,00	70,00	100,00%	
7	Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	Persentase kinerja realisasi pupuk (%)	99,65	99,65	100,00%	
8	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota dalam Provinsi	Nilai Ekspor (USD Juta)	1.100,00	2.547,26	231,57%	
		Jumlah Laporan Data Informasi dan Statistik Ekspor (Laporan)	12,00	12,00	100,00%	
9	Kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase penanganan pengaduan konsumen (%)	100,00	100,00	100,00%	
10	Kegiatan Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/ Kota (BPSMB)	Jumlah penambahan dan pengembangan Ruanglingkup UPTD BPSMB (Ruang Lingkup)	3,00	2,00	66,67%	
		Jumlah Layanan Sertifikasi dan Jasa LS Pro (Layanan Sertifikasi)	2,00	1,00	50,00%	
		Jumlah sampel yang diuji (sampel)	200,00	340,00	170,00%	
		Jumlah peralatan yang dikalibrasi (Peralatan)	5,00	-	0,00%	
		Jumlah Parameter Pengujian (Parameter)	1,00	-	0,00%	

11	Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	78,00	78,00	100,00%	
12	Kegiatan Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri (RPK)	Jumlah produk IKM yang terfasilitasi promosi dan pemasaran (Produk)	16,00	34,00	212,50%	
13	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran (Dokumen)	11,00	11,00	100,00%	
		Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah (Laporan)	7,00	7,00	100,00%	
14	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pengajuan Gaji dan Tunjangan (Dokumen)	26,00	41,00	157,69%	
		Jumlah Laporan Keuangan PD (Laporan)	26,00	26,00	100,00%	
15	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan kegiatan administrasi Umum PD (Laporan)	12,00	12,00	100,00%	
16	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Laporan)	2,00	2,00	100,00%	
17	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Laporan)	12,00	12,00	100,00%	
18	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah BMD yang dipelihara (Laporan)	12,00	12,00	100,00%	
19	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (BPSMB)	Jumlah Laporan Keuangan UPTD BPSMB (Laporan)	12,00	12,00	100,00%	
20	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (BPSMB)	Jumlah berkas kegiatan administrasi kepegawaian UPTD BPSMB (Berkas)	6,00	7,00	116,67%	
21	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (BPSMB)	Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Umum UPTD BPSMB (Laporan)	12,00	12,00	100,00%	
22	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (BPSMB)	Jumlah Berkas Jenis Barang Milik Daerah yang diadakan UPTD BPSMB (Berkas)	1,00	1,00	100,00%	
23	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Jumlah Berkas Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPTD BPSMB (Berkas)	12,00	12,00	100,00%	

	Pemerintahan Daerah (BPSMB)					
24	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (BPSMB)	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah UPTD BPSMB (Laporan)	12,00	12,00	100,00%	
25	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (RPK)	Jumlah Laporan Keuangan UPTD RPK	6,00	6,00	100,00%	
26	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (RPK)	Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Umum UPT RPK	6,00	6,00	100,00%	
27	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (RPK)	Jumlah Berkas Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPTD RPK (Berkas)	6,00	6,00	100,00%	
28	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (RPK)	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah UPTD RPK	6,00	6,00	100,00%	

3.3. REALISASI ANGGARAN

Anggaran dan Realisasi Program dan Kegiatan APBD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

Tabel 3.3.1 Capaian Realisasi Program dan Kegiatan APBD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021

No.	Kode	Program/Kegiatan	Pagu	Realisasi	%	Keterangan
I	3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	15.597.803.574	14.860.879.307	95,28	
1	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	77.072.956	47.904.630	62,15	
	1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	72.360.778	45.732.185	63,20	
	1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.712.178	2.172.445	46,10	
2	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.142.684.012	12.515.168.375	95,23	
	1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.131.760.562	12.507.145.175	95,24	
	1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	10.923.450	8.023.200	73,45	
3	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	191.778.808	152.905.935	79,73	
	1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.329.771	3.320.851	99,73	
	1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	22.007.109	21.969.100	99,83	
	1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	11.581.922	11.578.438	99,97	
	1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7.200.000	2.349.500	32,63	
	1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.861.006	11.860.775	100,00	
	1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.000.000	4.800.000	80,00	
	1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	17.250.000	17.156.000	99,46	
	1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	112.549.000	79.871.271	70,97	
4	1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	15.500.000	15.500.000	100,00	
	1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.500.000	15.500.000	100,00	
5	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.987.070.000	1.950.974.326	98,18	
	1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.428.000	5.425.000	99,94	
	1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	134.400.000	98.307.326	73,15	
	1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.842.000	2.842.000	100,00	
	1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.844.400.000	1.844.400.000	100,00	

6	1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	183.697.798	178.426.041	97,13	
	1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	31.730.000	30.984.000	97,65	
	1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Operasional atau Lapangan	40.875.004	38.436.042	94,03	
	1.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	6.552.294	6.431.000	98,15	
	1.09.09	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	103.991.000	102.574.999	98,64	
	1.09.10	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	549.500	-	-	
II	3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	-	-	-	
1	1.03	Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar	-	-	-	
	1.03.02	Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya	-	-	-	Refocusing
	1.03.03	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya	-	-	-	Refocusing
III	3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	207.102.794	197.209.655	95,22	
1	1.01	Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi Serta Lelang Komoditas	207.102.794	197.209.655	95,22	
	1.01.02	Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	207.102.794	197.209.655	95,22	
IV	3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	176.914.348	131.662.300	74,42	
1	1.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	18.953.316	14.823.000	78,21	
	1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di tingkat Distributor dan Sub Distributor	11.005.316	8.371.500	76,07	Refocusing
	1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting di tingkat Distributor dan Sub Distributor	7.948.000	6.451.500	81,17	Refocusing
2	1.02	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten / Kota yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan	151.944.441	113.106.500	74,44	

	1.02.01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/ Kota	39.376.010	30.874.700	78,41	
	1.02.02	Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah, Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	112.568.431	82.231.800	73,05	
3	1.03	<i>Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya</i>	6.016.591	3.732.800	62,04	
	1.03.01	Pemeriksaan Dokumen Perizinan Kegiatan Distribusi	-	-	-	Refocusing
	1.03.02	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi	5.212.301	3.732.800	71,62	Refocusing
	1.03.03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi	804.290	-	-	Refocusing
	1.03.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida	-	-	-	Refocusing
V	3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	12.049.754	11.829.754	98,17	
1	1.01	<i>Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada Lebih Dari 1(Satu) Daerah Kabupaten/Kota Dalam Provinsi</i>	12.049.754	11.829.754	98,17	
	1.01.01	Pameran Dagang Lokal	-	-	-	Refocusing
	1.01.02	Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	-	-	-	Refocusing
	1.01.03	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	12.049.754	11.829.754	98,17	
VI	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	109.899.753	90.812.400	82,63	
1	1.01	<i>Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/ Kota</i>	31.220.706	28.175.000	90,24	
	1.01.01	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	2.653.071	2.600.000	98,00	Refocusing
	1.01.02	Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen	11.922.000	9.135.000	76,62	Refocusing
	1.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen	16.645.635	16.440.000	98,76	Refocusing
2	1.03	<i>Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota</i>	78.679.047	62.637.400	79,61	
	1.03.01	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa Sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	78.679.047	62.637.400	79,61	

VII	3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	-	-	-	
1	1.01	Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri	-	-	-	
	1.01.01	Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	-	-	-	Refocusing
VIII	3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	660.733.563	520.076.368	78,71	
1	1.01	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	660.733.563	520.076.368	78,71	
	1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	12.828.000	11.320.000	88,24	Refocusing
	1.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	15.472.000	13.875.000	89,68	Refocusing
	1.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	111.180.000	70.180.000	63,12	
	1.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	521.253.563	424.701.368	81,48	
IX	3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	53.831.972	46.860.645	87,05	
1	1.01	Penerbitan Usaha Industri (IUI), Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	53.831.972	46.860.645	87,05	
	1.01.01	Fasilitasi Izin Usaha Industri (IUI), Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	2.870.000	1.640.000	57,14	
	1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi	50.961.972	45.220.645	88,73	
X	3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	-	-	-	
1	1.01	Penyediaan Informasi Industri Untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	-	-	-	
	1.01.01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	-	-	-	Refocusing

UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG						
XI	3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	480.571.576	417.167.589	86,81	
1	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.459.956	3.418.988	98,82	
	1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	3.459.956	3.418.988	98,82	
2	1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	27.875.000	23.130.800	82,98	
	1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	27.875.000	23.130.800	82,98	
3	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	85.556.578	67.859.286	79,32	
	1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.008.211	999.200	99,11	
	1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.897.107	3.361.467	86,26	
	1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.958.260	9.455.450	79,07	
	1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	300.000	300.000	100,00	
	1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12.680.000	12.277.500	96,83	
	1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	55.713.000	41.465.669	74,43	
4	1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	88.163.170	84.667.599	96,04	
	1.07.05	Pengadaan Mebel	-	-	-	Refocusing
	1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	88.163.170	84.667.599	96,04	
5	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	102.774.563	70.574.262	68,67	
	1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	18.774.563	17.784.881	94,73	
	1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	84.000.000	52.789.381	62,84	
6	1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	172.742.309	167.516.654	96,97	
	1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Operasional atau Lapangan	27.672.031	23.134.631	83,60	
	1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.310.278	4.280.000	99,30	
	1.09.09	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	140.760.000	140.102.023	99,53	
	1.09.10	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Refocusing
XII	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	160.217.891	135.177.065	84,37	
1	1.02	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah	160.217.891	135.177.065	84,37	
	1.02.01	Verifikasi Mutu Produk	25.662.385	19.479.964	75,91	
	1.02.02	Pengembangan Layanan Pengujian	123.065.506	109.341.501	88,85	

	1.02.04	Pengembangan Layanan Kalibrasi	11.490.000	6.355.600	55,31	Refocusing
		UPTD RUMAH PROMOSI DAN KEMASAN				
XIII	3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	48.742.049	44.196.041	90,67	
1	1.02	Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	48.742.049	44.196.041	90,67	
	1.02.07	Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	48.742.049	44.196.041	90,67	
XIV	3.31.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	166.948.480	135.302.734	81,04	
1	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.067.525	6.051.862	99,74	
	1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	6.067.525	6.051.862	99,74	
2	1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	
	1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	-	-	Refocusing
3	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	54.656.110	46.090.196	84,33	
	1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.912.196	1.896.536	99,18	
	1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.667.914	6.621.060	99,30	
	1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	200.000	150.000	75,00	
	1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.000.000	3.000.000	100,00	
	1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	42.876.000	34.422.600	80,28	
4	1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	
	1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Refocusing
5	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	58.800.000	37.685.186	64,09	
	1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	Refocusing
	1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	58.800.000	37.685.186	64,09	
6	1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	47.424.845	45.475.490	95,89	
	1.09.09	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	40.635.000	38.700.000	95,24	
	1.09.10	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6.789.845	6.775.490	99,79	
XV	3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	169.048.821	162.117.243	95,90	
1	1.01	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	169.048.821	162.117.243	95,90	
	1.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan	169.048.821	162.117.243	95,90	

		Industri dan Peran Serta Masyarakat				
		Total Nilai Belanja SKPD	17.843.864.575,00	16.753.291.101,00	93,89	

Didukung Anggaran dan Realisasi Belanja APBN Dekonsentrasi Tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

Tabel 3.3.2 Capaian Realisasi Program dan Kegiatan APBN Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021

No	Kementerian	Kode Satker	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
	Perindustrian	309028	Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah dan Aneka	891.043.000	875.265.988	98,23
	Perdagangan	309144	Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	559.912.000	506.827.083	90,52
	Perdagangan	309025	Peningkatan Perdagangan Luar Negeri	360.549.000	325.958.100	90,41
Total				1.811.504.000	1.708.051.171	94,29

BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2022 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan bentuk pertanggungjawaban dari serangkaian perencanaan, pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi tahun ke empat pelaksanaan RPJMD 2017-2022 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pengukuran kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2021, mencakup pencapaian sasaran yang menggambarkan kualitas capaian keluaran (output) atau hasil (outcome) dari kegiatan yang dilaksanakan tahun 2021.

Berdasarkan uraian pada Bab-bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan yang terkait dengan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2021, yakni :

- Sasaran 1: Meningkatnya PDRB Lapangan Usaha Industri Pengolahan, dengan Indikator Kinerja : Nilai Lapangan Usaha Industri Pengolahan dengan Target Kinerja Tahun 2021 Rp 14,25 Triliyun dengan realisasi sebesar Rp 17,924 Triliyun dengan tingkat capaian sebesar 125,78%
- Sasaran 2: Meningkatnya PDRB Lapangan Usaha Perdagangan, dengan Indikator Kinerja : Nilai Lapangan Usaha Perdagangan dengan Target Kinerja Tahun 2021 Rp 11,50 Triliyun dengan realisasi sebesar Rp 12,666 Triliyun dengan tingkat capaian sebesar 110,14%
- Sasaran 3: Meningkatnya Tata Kelola Internal Perangkat Daerah, dengan Indikator Kinerja : Nilai RB Perangkat Daerah dengan Target Kinerja Tahun 2021 80 dengan realisasi sebesar 74,81 dengan capaian 93,51%

Selama tahun 2021 ini ditemui adanya hambatan-hambatan yang mempengaruhi pencapaian sasaran program dan kegiatan tidak tercapai seratus persen, masih berdampaknya pandemi covid-19 yang mengakibatkan dilakukan refocusing anggaran berupa pengurangan dan penundaan pelaksanaan kegiatan 2021, dan masih berdampak pada penganggaran tahun 2022.

LAMPIRAN

- Daftar Aset
- Realisasi Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2021 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- Indikator Kinerja Kunci Perdagangan
- Indikator Kinerja Kunci Perindustrian

Daftar Aset



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
REKAPITULASI BARANG KE NERACA

PER 31-Dec-2021

Provinsi : PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
 Kab./Kota : -
 Bidang : Bidang Perindustrian
 Unit Organisasi : Dinas Perindustrian dan Perdagangan
 Sub Unit Organisasi : Dinas Perindustrian dan Perdagangan
 U P B : Dinas Perindustrian dan Perdagangan

KODE	NAMA BARANG	NILAI (Rp.)
1.3	ASET TETAP	19.078.952.793,32
1	TANAH	708.461.746,00
1.01	TANAH	708.461.746,00
2	PERALATAN DAN MESIN	14.225.329.234,50
2.01	ALAT BESAR	210.020.000,00
2.02	ALAT ANGKUTAN	1.007.064.500,00
2.03	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	1.195.379.430,00
2.04	ALAT PERTANIAN	191.461.500,00
2.05	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	1.768.332.988,00
2.06	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	621.560.300,00
2.07	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	17.223.800,00
2.08	ALAT LABORATORIUM	8.105.526.492,50
2.09	ALAT PERSENDATAAN	0,00
2.10	KOMPUTER	1.108.760.224,00
2.11	ALAT EKSPLORASI	0,00
2.12	ALAT PENGEBORAN	0,00
2.13	ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	0,00
2.14	ALAT BANTU EKSPLORASI	0,00
2.15	ALAT KESELAMATAN KERJA	0,00
2.16	ALAT PERAGA	0,00
2.17	PERALATAN PROSES/PRODUKSI	0,00
2.18	RAMBU - RAMBU	0,00
2.19	PERALATAN OLAH RAGA	0,00
3	GEDUNG DAN BANGUNAN	3.978.311.812,82
3.01	BANGUNAN GEDUNG	3.978.311.812,82
3.02	MONUMEN	0,00
3.03	BANGUNAN MENARA	0,00
3.04	TUGU TITIK KONTROL/PASTI	0,00
4	JALAN, JARINGAN DAN IRRIGASI	166.400.000,00
4.01	JALAN DAN JEMBATAN	0,00
4.02	BANGUNAN AIR	0,00
4.03	INSTALASI	166.400.000,00
4.04	JARINGAN	0,00
5	ASET TETAP LAINNYA	450.000,00
5.01	BAHAN PERPUSTAKAAN	450.000,00
5.02	BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAH RAGA	0,00
5.03	HEWAN	0,00
5.04	BOOTA PERAIRAN	0,00
5.05	TANAMAN	0,00
5.06	BARANG KOLEKSI NON BUDAYA	0,00
5.07	ASET TETAP DALAM RENOVASI	0,00
6	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	0,00
6.01	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	0,00
1.5	ASET LAINNYA	297.553.000,00
2	KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA	0,00
2.01	KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA	0,00

REKAPITULASI BARANG KE NERACA

Halaman 1 dari 2

Printed by: Bu Stella



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

REKAPITULASI BARANG KE NERACA

PER 31-Dec-2021

Provinsi : PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
 Kab./Kota : -
 Bidang : Bidang Perindustrian
 Unit Organisasi : Dinas Perindustrian dan Perdagangan
 Sub Unit Organisasi : Dinas Perindustrian dan Perdagangan
 U P B : Dinas Perindustrian dan Perdagangan

KODE	NAMA BARANG	NILAI (Rp.)
3	ASET TIDAK BERWUJUD	0,00
3.01	ASET TIDAK BERWUJUD	0,00
4	ASET LAIN-LAIN	297.553.000,00
4.01	ASET LAIN-LAIN	297.553.000,00

REKAPITULASI BARANG KE NERACA

Halaman 2 dari 2

Printed by Stella

Lampiran Indikator Kinerja Utama

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR : 188.4/ /SK/DISPERINDAG TAHUN 2021
TANGGAL: JULI 2021

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2017 – 2022**

- PERANGKAT DAERAH** : DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
- TUGAS** : Membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan bidang perdagangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Provinsi.
- FUNGSI** : 1. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian dan bidang perdagangan yang menjadi kewenangan Provinsi;
2. Penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang perindustrian dan bidang perdagangan yang menjadi kewenangan Provinsi;
3. Penyelenggaraan administrasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
4. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas Perindustrian dan Perdagangan; dan
5. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

NO.	SEBELUM PERUBAHAN		NO.	SESUDAH PERUBAHAN	
	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
1	Meningkatnya Pertumbuhan Usaha Industri	Persentase Pertumbuhan Usaha Industri	1	Meningkatnya PDRB Lapangan Usaha Industri Pengolahan	Nilai Lapangan Usaha Industri Pengolahan (Trilyun Rp)
2	Meningkatnya Neraca Perdagangan	Nilai Neraca Perdagangan	2	Meningkatnya PDRB Lapangan Usaha Perdagangan	Nilai Lapangan Usaha Perdagangan (Trilyun Rp)
3	Meningkatnya Nilai Akuntabilitas dan Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi	Nilai SAKIP Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi	3	Meningkatnya Tata Kelola Internal Perangkat Daerah	Nilai RB Perangkat Daerah

KEPALA DINAS,

Drs. H. TARMIN, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19681111 199009 1 001

Realisasi Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2021 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

a. Kepala Dinas: Drs. H. Tarmin, M. Si

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Formula Perhitungan Target
1	Meningkatnya PDRB Lapangan Usaha Industri Pengolahan	Nilai Lapangan Usaha Industri Pengolahan	14,250	17,924	Nilai PDRB Lapangan Usaha Industri Pengolahan (Triliyun Rp)
2	Meningkatnya PDRB Lapangan Usaha Perdagangan	Nilai Lapangan Usaha Perdagangan	11,500	12,666	Nilai PDRB Lapangan Usaha Perdagangan (Triliyun Rp)
3	Meningkatnya Tata Kelola Internal Perangkat Daerah	Nilai RB Perangkat Daerah	80,00	74,81	Nilai RB Perangkat Daerah

b. Sekretaris Dinas: Deki Susanto, S.T.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Formula Perhitungan Target
1.	Meningkatkan Akuntabilitas Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Disperindag)	80,00	74,81	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Disperindag)
2.	Meningkatkan Akuntabilitas Perangkat Daerah	Survey Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah (Disperindag)	80,00	67,66	Nilai Survey Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah (Disperindag)

- Kepala Sub Bagian Perencanaan: Aula Dedy Sayogo, S.Kom., M.E.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Formula Perhitungan Target
1.	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan penganggaran	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	11	11	Jumlah dokumen (N)
2.	Tersedianya Laporan Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah	7	7	Jumlah Laporan (N)

- Kepala Sub Bagian Umum: Wisniarti, S.H.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Formula Perhitungan Target
1.	Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan kegiatan administrasi Umum PD	12	12	Jumlah Laporan (N)
2.	Tertib administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Disperindag	2	2	Jumlah Laporan (N)
3.	Tersedianya Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	12	Jumlah Laporan (N)
4.	Terlaksananya pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	Jumlah Laporan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	12	12	Jumlah Laporan (N)

	Urusan Pemerintahan Daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah BMD yang dipelihara			
5.	Tertib administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah berkas administrasi kepegawaian PD	23	23	Jumlah berkas (N)
6.	Tertib administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan Barang milik daerah yang terinventarisasi	2	2	Jumlah laporan (N)

- Kepala Sub bagian Keuangan: Rita Wisna, S.E.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Formula Perhitungan Target
1.	Tersedianya Jumlah Dokumen Pengajuan Gaji dan Tunjangan	Jumlah Dokumen Pengajuan Gaji dan Tunjangan	26	26	Jumlah Dokumen (N)
2.	Tersedianya Laporan Keuangan PD tepat waktu	Jumlah Laporan Keuangan PD	26	26	Jumlah Laporan (N)
3.	Tersedianya Laporan administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah administrasi keuangan perangkat daerah	6	6	Jumlah Laporan (N)

c. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Industri: Subekti Saputra, S.TP.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Formula Perhitungan Target
1.	Meningkatnya Pertumbuhan Usaha Industri	Persentase Pertumbuhan Unit Usaha Industri	1	1	$\frac{\text{Pertumbuhan Usaha Industri (N)} - \text{Pertumbuhan Usaha Industri (N-1)}}{\text{Pertumbuhan Usaha Industri (N)}} \times 100\%$

- Kepala Seksi Sumber Daya Industri: Dian Novita, S.T.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Formula Perhitungan Target
1.	Meningkatnya Tenaga Kerja Industri Pengolahan	Jumlah Tenaga Kerja Industri Pengolahan	49.500	49.500	Jumlah Tenaga Kerja Industri Pengolahan (N)

- Kepala Seksi Fasilitas dan Akses Industri: Harry Kustiwi Ahza, S.S.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Formula Perhitungan Target
1.	Terwujudnya Pertumbuhan Nilai Investasi Industri Pengolahan	Nilai Investasi Industri Pengolahan Non Migas (Rp. Triliun)	4.857	4.857	Nilai Investasi Industri Pengolahan Non Migas (N) (Rp. Triliun)

- Kepala Seksi Perwilayahan dan Sarana Prasarana Industri: Muhammad Nazli, S.AP.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Formula Perhitungan Target
1.	Meningkatnya Sarana Prasarana Kawasan Industri	Jumlah Sarana Prasarana Kawasan Industri	1	1	Jumlah Sarana Prasarana Kawasan Industri (N)
2.	Meningkatnya Sebaran Wilayah Industri	Jumlah Sebaran Wilayah Industri	1	1	Jumlah Sebaran Wilayah Industri (N)

d. Kepala Bidang Pengendalian dan Fasilitasi Usaha Industri: Supianto, S.T., M.Si.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Formula Perhitungan Target
1.	Meningkatnya Industri yang sesuai Izin Usaha Industri	Prosentase Industri yang sesuai Izin Usaha Industri	30	30	Jumlah Industri sesuai IUI (N)/ Jumlah Industri sesuai IUI (Babel=50) x 100%
2.	Meningkatnya data informasi industri di Aplikasi SIINas	Prosentase data informasi industri di SIINas	70	70	Jumlah informasi industri di SIINAS (sd.N)/ Jumlah informasi industri di SIINAS (Babel=76) x 100%

- Kepala Seksi Fasilitasi Usaha Industri: Muhammad Rizal, S.IP.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Formula Perhitungan Target
1.	Terpantaunya Usaha Industri dalam penerbitan IUI,IPUI, IUKI dan IPKI	Jumlah Usaha Industri dalam penerbitan IUI,IPUI, IUKI dan IPKI yg dipantau	20	20	Jumlah Usaha Industri (N)

- Kepala Seksi Pengendalian Industri: Tri Susanyati, S.E.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Formula Perhitungan Target
1.	Terawasinya IUI	Jumlah IUI yang diawasi	1	1	Jumlah IUI (N)

- Kepala Seksi Analisa Data Industri: Ari Masdan, S.T.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Formula Perhitungan Target
1.	Terdatanya informasi industri secara lengkap dalam SIINas	Persentase Industri yang menyampaikan informasi industri secara lengkap dalam SIINas	60	60	Jumlah informasi industri di SIINAS (sd.N)/ Jumlah informasi industri di SIINAS (Babel=76) x 100%

e. Kepala Bidang Pengendalian Perdagangan dan Perlindungan Konsumen: Fadjri Djagahitam, S.H

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Formula Perhitungan Target
1.	Terwujudnya Iklim Usaha yang Kondusif	Persentase Tertib Usaha	65	65	Jumlah Pelaku Usaha (N)/ Jumlah Pelaku Usaha (Babel=3) x 100%
2.	Terwujudnya kecukupan bahan pangan untuk masyarakat	Persentase Stabilitas dan Jumlah Ketersediaan Harga Barang Kebutuhan Pokok	9.20	2,25	Nilai Koefisien Variasi <11%
3.	Meningkatnya Indeks Keberdayaan Konsumen	Nilai Indeks Keberdayaan Konsumen	40		Nilai Indeks Keberdayaan Konsumen (N)

- Kepala Seksi Fasilitasi Perdagangan: Darma Kurniawan, S.T.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Formula Perhitungan Target
1.	Tersedianya Pelaku Usaha Perdagangan Minuman beralkohol yang memiliki Perizinan Perdagangan	Jumlah Pelaku Usaha yang memiliki perizinan	1	1	Jumlah Pelaku Usaha (N)
2.	Tersedianya Pelaku Usaha Perdagangan B2 yang memiliki Perizinan Perdagangan	Jumlah Pelaku Usaha perdagangan B2 yang memiliki perizinan Perdagangan B2	2	2	Jumlah Pelaku Usaha (N)
3.	Terpantaunya Surat Keterangan Asal (SKA) dan Pelaku Ekspor	Jumlah persentase SKA dan Pelaku Ekspor yang terpantau	100	100	Jumlah SKA (N)/ Jumlah Pengajuan SKA (N) x 100%

- Kepala Seksi Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Formula Perhitungan Target
1.	Terwujudnya kecukupan bahan pangan untuk masyarakat	Persentase jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok	70	70	Ketersediaan Stok barang kebutuhan pokok dan penting (N) / Ketersediaan barang kebutuhan pokok dan penting (N) X 100 %
2.	Terwujudnya kecukupan bahan pangan untuk masyarakat	Persentase stabilitas harga barang kebutuhan pokok	70	70	Stok harga barang kebutuhan pokok terdistribusi (N) / harga barang kebutuhan pokok (N) X 100 %
3.	Meningkatnya kepastian penyaluran pupuk/ pestisida bersubsidi sesuai ketentuan jenis, jumlah, waktu, harga, mutu, dan tempat	Persentase kinerja realisasi pupuk	99.65	99.65	Jumlah penyaluran pupuk/pestisida bersubsidi (N)/ Jumlah pupuk/pestisida bersubsidi (N) x 100%

- Kepala Seksi Perlindungan Konsumen: Zurista, S.E.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Formula Perhitungan Target
1.	Meningkatnya Keberdayaan Konsumen	Persentase penanganan pengaduan konsumen	100	100	Jumlah penanganan pengaduan (N)/ Jumlah pengaduan (N) x 100%
2.	Meningkatnya Kepercayaan Konsumen	Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	78	78	Jumlah barang yg diawasi (N)/jumlah barang sesuai ketentuan (babel=51) x 100%

f. Kepala Bidang Sarana Perdagangan dan Pengembangan Ekspor: Moch. Nasirin Yusuf EF, S.IP., M.M.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Formulasi Perhitungan Target
1.	Meningkatnya sarana dan Barang terdistribusi	Prosentase Barang terdistribusi	75	75	Jumlah terdistribusi (N)/ Jumlah dikelola (babel=200Ton) x 100%
2.	Meningkatnya Kinerja Ekspor Bernilai Tambah Tinggi	Persentase Pertumbuhan nilai ekspor	2	89,16	Nilai Ekspor (N) - Nilai Ekspor (N-1)/ Nilai Ekspor (N) X 100%
3.	Meningkatnya jumlah produk lokal yang di gunakan dan di pasarkan	Jumlah Produk Lokal yang digunakan dan dipasarkan	12	12	Jumlah Produk Lokal yang digunakan dan dipasarkan (N)

- Kepala Seksi Sarana Distribusi Perdagangan: Mardian Zulkarnain, S.AN,M.Si.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Formulasi Perhitungan Target
1.	Terwujudnya dan terkelolanya sarana distribusi perdagangan dan Pasar Lelang Komoditas	Persentase sarana distribusi yang terkelola	35	35	Jumlah sarana distribusi yang terkelola(N)/ Jumlah sarana distribusi x 100%

- Kepala Seksi Pengembangan Ekspor: Rosy Handayani, S.S., M.Si.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Formulasi Perhitungan Target
1.	Meningkatnya Nilai Ekspor	Nilai Ekspor (Juta USD)	1.100	2.547,26	Nilai Ekspor (USD Juta) (N)

- Kepala Seksi Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri: Novirawati, S.E.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Formulasi Perhitungan Target
1.	Meningkatnya Jumlah Produk lokal yang dipromosikan	Jumlah produk lokal yang dipromosikan	6	6	Jumlah produk (N)
2.	Meningkatnya Jumlah Produk lokal yang dipasarkan	Jumlah produk lokal yang di pasarkan	6	6	Jumlah produk (N)
3.	Meningkatnya jumlah produk lokal yang digunakan	Jumlah produk Lokal yang di gunakan	0	0	Jumlah produk (N)

g. Kepala UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang: Armaini, S.T.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Formulasi Perhitungan Target
1.	Tercapainya pelaksanaan ruang lingkup, layanan Sertifikasi dan terpelihara akreditasi Laboratorium Pengujian dan sertifikasi	Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku (UPTD BPSMB)	70	70	Jumlah Ruang Lingkup (N)/ Jumlah Ruang Lingkup (=4) x 100%
2.	Meningkatkan Pelayanan UPTD Balai	Survey Kepuasan Pelayanan Teknis	80	67,66	Nilai Survey (N)

	Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang			
--	---------------------------------------	---	--	--	--

- Kepala Sub Bagian Tata Usaha: Nurul Hidayah, S.E.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Formula Perhitungan Target
1.	Tersedianya Laporan Keuangan UPTD BPSMB	Jumlah Laporan Keuangan UPTD BPSMB	12	12	Jumlah Laporan (N)
2.	Tertib administrasi kepegawaian UPTD BPSMB	Jumlah berkas kegiatan administrasi kepegawaian UPTD BPSMB	10	10	Jumlah berkas (N)
3.	Tertib Administrasi Umum UPTD BPSMB	Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Umum UPTD BPSMB	12	12	Jumlah Laporan (N)
4.	Tersedianya barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPTD BPSMB	Jumlah Berkas Jenis Barang Milik Daerah yang diadakan UPTD BPSMB	1	1	Jumlah Berkas (N)
5.	Tersedianya Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPTD BPSMB	Jumlah Berkas Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPTD BPSMB	12	12	Jumlah Berkas (N)
6.	Terlaksananya pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPTD BPSMB	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah UPTD BPSMB	12	12	Jumlah Berkas (N)

- Kepala Seksi Pengendalian Mutu: Ikhsania Suhartini, S.Sos., M.M.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Formula Perhitungan Target
1.	Tercapainya pelaksanaan ruang lingkup, layanan Sertifikasi dan terpelihara akreditasi Laboratorium Pengujian dan sertifikasi	Jumlah penambahan dan pengembangan Ruang lingkup (UPTD BPSMB)	3	2	Jumlah Ruang lingkup (N)
2.	Terlaksananya Layanan Sertifikasi LS Pro	Jumlah Layanan Sertifikasi dan Jasa LS Pro	2	1	Jumlah Layanan Sertifikasi (N)
3.	Tercapainya pelaksanaan ruang lingkup, layanan Sertifikasi dan terpelihara akreditasi Laboratorium Pengujian dan sertifikasi	Jumlah Parameter Pengujian	1	-	Jumlah Parameter (N)

- Kepala Seksi Pengujian, Sertifikasi dan Kalibrasi: Herdian, S.T.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Formula Perhitungan Target
1.	Meningkatnya Pengujian sampel (sampel uji tersertifikasi)	Jumlah sampel yang diuji	200	340	Jumlah sampel (N)

2.	Meningkatnya peralatan yang dikalibrasi (Peralatan tersertifikasi)	Jumlah peralatan yang dikalibrasi	5	-	Jumlah peralatan (N)
----	--	-----------------------------------	---	---	----------------------

h. Kepala UPTD Rumah Promosi dan Kemasan: Alfatah Suriaan, S.Si.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Formula Perhitungan Target
1.	Meningkatnya jumlah produk IKM yang dipasarkan	Persentase Produk IKM yang dipasarkan (UPTD RPK)	70	100	Jumlah Produk IKM yang dipasarkan (N) / Jumlah Produk IKM (N) X 100%
2.	Meningkatnya jumlah Kemasan produk IKM yang diproduksi	Persentase Kemasan Produk IKM yang diproduksi (UPTD RPK)	70	100	Jumlah Kemasan Produk IKM yang diproduksi (N) / Jumlah Permintaan Kemasan (N) X 100%
3.	Meningkatkan Pelayanan UPTD Rumah Promosi dan Kemasan	Survey Kepuasan Pelayanan Teknis Rumah Promosi dan Kemasan	80	67,66	Nilai Survey (N)

- Kepala Sub Bagian Tata Usaha: Suwandi, S.T., M.Sc.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Formula Perhitungan Target
1.	Tersedianya Jumlah Laporan Keuangan UPTD RPK	Jumlah Laporan Keuangan UPTD RPK	6	6	Jumlah Laporan (N)
2.	Tertib administrasi kepegawaian UPTD RPK	Jumlah berkas kegiatan administrasi kepegawaian UPTD RPK	4	4	Jumlah berkas (N)
3.	Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah UPTD RPK	Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Umum UPTD RPK	6	6	Jumlah Laporan (N)
4.	Tersedianya barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPTD RPK	Jumlah Berkas Jenis Barang Milik Daerah yang diadakan UPTD RPK	1	1	Jumlah Berkas (N)
5.	Tersedianya Berkas Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPTD RPK	Jumlah Berkas Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPTD RPK	6	6	Jumlah Berkas (N)
6.	Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah UPTD RPK	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah UPTD RPK	6	6	Jumlah Laporan (N)

- Kepala Seksi Pelayanan Teknis: Zaldy, S.T.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Formula Perhitungan Target
1.	Tersedianya Laporan produk yang difasilitasi	Jumlah Laporan produk yang difasilitasi	6	6	Laporan (N)

- Kepala Seksi Pengembangan dan Pemasaran: Yossie Riestu Pradhifta, S.Ds.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Formula Perhitungan Target
1.	Melakukan fasilitasi promosi dan pemasaran bagi produk IKM	Jumlah produk IKM yang terfasilitasi promosi dan pemasaran	16	34	produk IKM yang terfasilitasi promosi dan pemasaran (N)

INDIKATOR KINERJA KUNCI PERDAGANGAN

No	URUSAN	No.	IKK	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
URUSAN PERDAGANGAN						
30	IKK Outcome	1	Pertumbuhan nilai ekspor non migas	$\frac{2.660.250.296 - 1.188.865.806}{1.188.865.806} \times 100\%$	123,76%	Data Sementara, Bea cukai Diolah Bidang SP2E
	IKK Output	1.1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh fasilitas promosi dagang	$\frac{10}{45} \times 100\%$	22,22%	
		1.2	Persentase pelaku usaha yang memperoleh fasilitas pengembangan produk	$\frac{100}{100} \times 100\%$	100%	
		1.3	Persentase pelaku usaha yang memperoleh pelatihan/ fasilitas peningkatan kapasitas terkait ekspor	$\frac{54}{54} \times 100\%$	100%	
		1.4	Persentase pelaku usaha yang menjadi eksportir baru	$\frac{2}{10} \times 100\%$	20%	

IKK Outcome	2	Persentase penanganan pengaduan konsumen	$\frac{19}{19} \times 100\%$	100 %	Ditangani dan Diselesaikan Disperindag
IKK Output	2.1	Jumlah penanganan pengaduan konsumen	19 + 0	19	Ditangani Disperindag
	2.2	Jumlah konsumen dan pelaku usaha yang tereduksi	116 + 90	206	
IKK Outcome	3	Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku	$\frac{299}{340} \times 100\%$	87,94 %	
IKK Output	3.1	Jumlah komoditi potensial yang dipantau	1	1	Lada Putih (SNI 0004 2013)
	3.2	Indeks Kinerja BPSMB	3+ 1+ 1	5	Indeks SDM = 7 Indeks Contoh Uji = 340 Indeks Akreditasi = 2
IKK Outcome	4	Tertib Usaha		0	Tidak ada Toko Bebas Bea di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
IKK Output	4.1	Persentase SIUP Minuman Beralkohol (MB) bebas bea yang diterbitkan		0	Bukan Kewenangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Surat Pernyataan

		4.2	Persentase rekomendasi SIUP MB bagi Distributor yang diterbitkan		0	Bukan Kewenangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Surat Pernyataan
		4.3	Persentase SIUP Bahan Berbahaya bagi pengecer yang diterbitkan		0	Surat Pernyataan
		4.4	Persentase penerbitan SIUP MB Gol B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum di tempat		0	Bukan Kewenangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Surat Pernyataan
		4.5	Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu	$\frac{1080}{1080} \times 100\%$	100 %	
	IKK Outcome	5	Persentase kinerja realisasi pupuk	$\frac{58.926}{67.485} \times 100\%$	87,32%	Data Sementara sd Bulan Oktober 2021
	IKK Output	5.1	Pengawasan pupuk dan pestisida terhadap pengadaan penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi dan pestisida per tahun di provinsi		97,02%	Data Sementara sd Bulan November 2021
	IKK Outcome	6	Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	$\frac{39}{51} \times 100\%$	76,47 %	

IKK Output	6.1	Jumlah barang beredar yang diawasi		10	
IKK Outcome	7	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok		2,25	Sumber Disperindag
IKK Output	7.1	Beroperasinya pusat distribusi yang melayani wilayah provinsi a. Tersedianya bangunan pusat distribusi b. Telah ditetapkannya badan usaha pengelola pusat distribusi c. Beroperasinya pusat industri d. Menguasai 20% pangsa pasar pada komoditas yang ditangani		a. ada b. ada c. ada d. ada	Tersedia
	7.2	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	Beras : 0,77 Tepung Terigu : 5,27 Minyak Goreng : 5,27 Susu : 0,76 Telur : 7,37 Kacang Kedelai : 6,90 Kacang Tanah : 3,04 Ketela Pohon : 15,90 Kacang Hijau : 6,67 Ikan Asin Teri : 4,70 Jagung Pipil Kering : 4,09 Gula Pasir : 1.30 Garam Beryodium : 7,31 Daging : 8,94 Cabe Rawit : 58,12 Cabe Merah : 36,54		

				Bawang Putih : 6,72 Bawang Merah : 10,76 Bawang Bombai : 15.18		
		7.3	Persentase laporan harga harian melalui sistem informasi harga Kemendag	281 ----- x 100% 281	100%	Sistem Informasi Harga Kementerian Perdagangan

Pangkalpinang, 31 Desember 2021

**Kepala Dinas
Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,**

**Drs. H. TARMIN, M. SI
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 196811111990091001**

INDIKATOR KINERJA KUNCI PERINDUSTRIAN

URUSAN PERINDUSTRIAN						
IKK Outcome	1	Pertambahan jumlah industri besar di provinsi	$\frac{37 - 33}{33} \times 100$		12,1 %	
IKK Outcome	2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	<ol style="list-style-type: none"> Pertumbuhan sektor industri nonmigas Kontribusi industri nonmigas terhadap PDRB Nilai Ekspor produk industri nonmigas Jumlah Tenaga Kerja di sektor industri pengolahan nonmigas <p>Realisasi Jumlah Tenga Kerja Industri 2021</p> $\frac{53.181}{49.500} \times 100\% = 107,44\%$ <p>Target Jumlah Tenga Kerja Industri dalam RPIP</p> <ol style="list-style-type: none"> Nilai Investasi nonmigas akumulatif <p>Realisasi Investasi Industri Nonmigas 2021</p> $\frac{4.938}{4.857} \times 100\% = 101,67\%$		544% 109,78% 2,647 107,44% 101,67%	

IKK Output	2.1	Persentase terselesainya dokumen RPIP sampai dengan ditetapkan menjadi perda	<p>Tersusunnya Naskah Dinas Akademik (30%)</p> <p>Tersusunnya Draft Raperda RPIP (20%)</p> <p>Draft Raperda RPIP yang disetujui DPRD dan mendapat Rekomendasi Kementerian Perindustrian (25%)</p> <p>Persetujuan Draft Raperda RPIP oleh Ditjen Bina Bangda (25%)</p> <p>Penetapan Perda RPIP (10%)</p>		Sudah Selesai
IKK Outcome	3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait	<p>20</p> <p>-----x 100%</p> <p>37</p>	54,05 %	
IKK Output	3.1	Persentase jumlah izin usaha industri (IUI) besar yang diterbitkan	<p>1</p> <p>-----x 100%</p> <p>1</p>	100 %	Verifikasi Teknis
IKK Outcome	4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) bagi Industri Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait	<p>0</p> <p>-----x 100%</p> <p>0</p>	0 %	Surat Pernyataan
IKK Output	4.1	Persentase jumlah izin perluasan industri IPUI) bagi industri besar yang diterbitkan	0	0 %	Surat Pernyataan

IKK Outcome	5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi yang dikeluarkan oleh instansi terkait	$\frac{0}{0} \times 100\%$	0 %	Surat Pernyataan	
IKK Output	5.1	Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 provinsi	0	0 %	Surat Pernyataan	
IKK Outcome	6	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	<p>1)Keterkinian informasi industri :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 0-6 bulan (50%) - Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 7-12 bulan (25%) - Tidak menyampaikan informasi industri (0%) <p>2) Kelengkapan informasi industri meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Informasi produksi dan kapasitas produksi (10%) - Informasi bahan baku dan bahan penolong (10%) 		Surat Pernyataan	

	IKK Output	6.1	Persentase data perusahaan industri besar dan perusahaan kawasan industri lintas kabupaten/kota yang masuk dalam SII Nas terhadap total populasi perusahaan industri besar dan perusahaan kawasan industri lintas kab/kota	$\frac{0}{0} \times 100\%$	0	Surat Pernyataan
--	------------	-----	--	----------------------------	---	------------------

Pangkalpinang, 31 Desember 2021

Kepala Dinas
Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,

Drs. H. TARMIN, M. SI
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 196811111990091001



DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Jalan Pulau Bangka, Komplek Perkantoran Pemprov, Air Itam, Bukit Intan, Pangkalpinang 33148

Telp : 0717 – 439 093

Web : <http://perindag.babelprov.go.id>

Fax : 0717 – 439 093

email : perindag@babelprov.go.id